



**PERAN PENDAMPING PKH DALAM PROGRAM PENYALURAN  
BANTUAN SOSIAL DIDESA BINA BARU KECAMATAN KAMPAR KIRI  
TENGAH**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

**DISUSUN OLEH:**

**SILVIA FEBRI AGATA**

**NIM: 11840122675**

**UIN SUSKA RIAU**

**PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
TP. 2025**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004  
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052  
web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>; E-mail: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

**PENGESAHAN**

Skrripsi Dengan Judul: **"Peran Pendampingan PKH Dalam Program Penyaluran Bantuan Sosial Dda Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah"** yang ditulis oleh :

: Silvia Febri Agata  
: 11840122675  
: Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hari/tanggal : Selasa, 8 Juli 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Juli 2025

Dekan



**Prof. Dr. Masduki, M.Ag**  
NIP. 19710612 199803 1 003

**Panitia Sidang Munaqasah**

Ketua Penguji I

**Yefni M.Si**

NIP. 19700914 201411 2 001

Penguji III

**Rosma, M.Ag**

NIP. 19741113 200501 2 005

Sekretaris / Penguji II

**Muhammad Soim, S.Sos.I, MA**

NIP. 19830622 202321 1 014

Penguji IV

**Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si**

NIP. 19700301 199903 2 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pekanbaru, 2 Juli 2025

: Nota Dinas

: Pengajuan Ujian Skripsi

Kepada Yth

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **Silvia Febri Agata**, NIM. 11840122675 dengan judul **"Problematika Penampungan PKH Dalam Program Penyaluran Bantuan Sosial Didesa Bina Baru Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar"** Telah dapat diajukan untuk mengikuti **Ujian Skripsi/Munaqasah** guna Islam memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

Mengetahui,  
Pembimbing Skripsi

**Dr. Ginda Harahap, M.Ag**  
NIP. 19630326 199102 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarah mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya  
terhadap penulis skripsi saudara:

: Silvia Febri Agata

: 11840122675

: Problematika Pendampingan PKH Dalam Program Penyaluran Bantuan Sosial  
Didesa Bina Baru Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan  
guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk  
ikuti dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam  
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

**Dr. Ginda Harahap, M.Ag**  
NIP. 19630326 199102 1 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

**Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19700301 199903 2 002



## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

: Silvia Febri Agata  
 : 11840122675  
 : Bina Baru, 8 Februari 2000  
 : Pengembangan Masyarakat Islam  
 : Problematika Pendampingan PKH Dalam Program Penyaluran  
 Bantuan Sosial Didesa Bina Baru Kec. Kampar Kiri Tengah Kab.  
 Kampar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang sesuai disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta UUD yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 2 Juli 2025  
 Yang membuat pernyataan



Silvia Febri Agata  
 NIM. 11840122675

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang menjiplak sebagian atau seluruh karangan tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**ABSTRAK**

**Nama : Silvia Febri Agata**

**Nim : 11840122675**

**Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam**

**Fakultas : Dakwah Dan Ilmu Komunikasi**

**Judul Penelitian : Peran Pendamping PKH Dalam Progam Penyaluran Bantuan Sosial di Desa Bina Baru Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pendamping dalam penyaluran bantuan sosial PKH di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah ditemukan beberapa kendala saat penyaluran bantuan sosial PKH, peneliti ingin melihat peran pendamping dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori peran pendampingan menurut Miftahul Khair. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian meliputi peran pendamping dalam hal administrasi atau teknis diantara peran tersebut adalah sebagai pemberi motivasi kepada Keluarga Penerima Manfaat, memfasilitasi kegiatan penyaluran bantuan sosial, penghubung antar instansi, memberikan edukasi dalam kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dan pihak verifikasi data KPM. Kesimpulan dalam penelitian menunjukkan bahwa pendamping memiliki peran penting dalam menyikapi permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial.

**Kata Kunci: Pendamping Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial, Desa Bina Baru.**

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang  
UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## ABSTRACT

**Nama : Silvia Febri Agata**

**Nim : 11840122675**

**Major : Development of Islamic Society**

**faculty : Da'wah and Communication Science**

**Title : The Role of PKH Companions in the Social Assistance Distribution Program in Bina Baru Village, Kampar Kiri Tengah District, Kampar Regency**

This study aims to determine the role of facilitators in the distribution of PKH social assistance in Bina Baru Village, Kampar Kiri Tengah District. The main problem in this study is that several obstacles were found during the distribution of PKH social assistance. Then the researcher wanted to see the role of facilitators in resolving these problems. This study uses the theory of the role of facilitators according to Edi Suharto. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results of the study explain the role of facilitators both in administrative and technical terms, among these roles are as a motivator to Beneficiary Families, facilitating social assistance distribution activities, liaison between agencies, providing education in family capacity building meetings (P2K2) and KPM data verification parties. The conclusion in the study shows that facilitators have an important role in addressing problems in the distribution of social assistance, facilitators can act as facilitators, mediators, educators, motivators.

**Keywords: Family Hope Program Companion, Social Assistance, New Development Village..**

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa penulis persembahkan kehadirat Allah SWT, atas anugerah rahmat, taufik, dan hidayah serta inayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini bisa diselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang selalu mengharap syafa'atnya sampai dihari akhir kelak.

Segala puji bagi Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Problematika Pendampingan PKH Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari peranan berbagai pihak yang telah membantu penulis, baik berupa bimbingan, tenaga, waktu, pemikiran, materi maupun motivasi dan do'a. Terutama sekali penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, Ayah tercinta (Marsudiono), Ibu tercinta (Saniah), Abang (Sengeng Sutrisno S.E), dan Kakak (Istiqomah S.Sn) yang saya sayangi, serta seluruh anggota keluarga besar yang telah berusaha keras dan tanpa lelah mencurahkan kasih sayang serta perhatiannya demi terwujudnya cita-cita penulis.

Selain dukungan dan do'a keluarga penulis juga banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun materil dari banyak pihak yang terkait, untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, ST,





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M.Eng Wakil Rektor II, Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah Bapak Prof. Masduki, M.Ag, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Firdaus El Hadi S.Sos, M.Soc, Sc selaku Wakil Dekan II, ,Bapak Dr. Dr.H. Arwan M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.

Ibu Dr. Titi Antin, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam dan Ibu Yefni, S.Ag.,M.Si selaku Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Kodarni S.ST, M.Pd selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah membimbing penulis selama belajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Dr. Ginda Harahap M.Ag selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan motivasi, masukan, bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam N'egeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pengajaran kepada penulis selama kuliah di Perguruan Tinggi Negeri ini.

7. Seluruh Karyawan dan Karyawati Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan pelayanan yang baik dan memudahkan pengurusan administrasi.

8. Bapak Udin Jarnuji selaku kepala Desa Bina Baru yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Desa Bina Baru, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar.

9. Bapak Syafrizal S.E selaku Pendamping PKH Desa Bina Baru yang telah membantu dan memudahkan peneliti memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data yang dibutuhan penulis



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Abang Yogi Aryo Logce S.Ip terimakasih atas segala dukungan dan support system serta nasehat yang telah diberikan kepada penulis.
11. Teman-teman seperjuangan Pengembangan Masyarakat Islam Angkatan 2018 terkhusus Teman-teman Lokal C “Pejuang S.Sos” yang saat ini sama-sama sedang menyusun skripsi, terimakasih atas suka dan dukanya selama penulis mengemban ilmu di Jurusan ini. Terima kasih juga kepada para senior yang telah berbagi pengalaman, dan membantu penulis dalam berbagai hal.
12. Penulis ingin mengucapkan terimakasih juga kepada diri sendiri atas keberanian untuk terus melangkah meskipun sering kali diragukan dan merasa Lelah. Terimakasih sudah mau berjuang, belajar dan bertumbuh melalui proses yang panjang. Semoga pencapaian ini menjadi bukti bahwa penulis mampu melewati masa-masa sulit dengan tekad, keyakinan dan semangat yang kuat.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang terlibat, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan semangat dan dukungannya semoga tercatat sebagai pahala dan mendapat balasan kebaikan berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 04 July 2025

Penulis

Silvia Febri Agata

11840122675

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Penegasan Istilah.....	6
1.3. Rumusan Masalah .....	7
1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
2.1 Penelitian Terdahulu .....	9
2.2 Landasan Teori.....	15
2.3 Konsep Operasional .....	34
2.4 Kerangka Pikir .....	35
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Desain Penelitian.....	37
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	38
3.3 Sumber Data.....	38
3.4 Subjek Objek Penelitian .....	39
3.5 Informan Penelitian.....	39
3.6 Alat Pengumpulan Data .....	40
3.7 Validasi Data.....	41
3.8 Analisis Data .....	42





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Ditamalkan UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## **BAB IV TINJAUAN LOKASI PENELITIAN**

4.1.	Gambaran Umum.....	44
4.2.	Profil Program Keluarga Harapan .....	45
4.3.	Struktur Organisasi Program Keluarga Harapan Desa Bina Baru .....	46
4.4.	Mekanisme Penyaluran Dan Pendampingan .....	46
4.5.	Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan .....	47
4.6.		

## **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

5.1.	Hasil Penelitian .....	49
5.2.	Pembahasan.....	65

## **BAB VI PENUTUP**

6.1.	Kesimpulan .....	71
6.2.	Saran .....	72

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### DAFTAR TABEL

1.	Komponen PKH.....	29
3.	Informan Penelitian.....	40
5.	Informan Penelitian.....	49
5.	Materi Pertemuan Kelompok P2K2 .....	68



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR GAMBAR

2. Gambar Kerangka Pikir.....	36
-------------------------------	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah serius yang dialami oleh sebahagian negara di dunia. Kemiskinan tidak hanya terjadi di negara-negara kawasan Afrika, melainkan juga dialami di negara-negara kawasan Asia seperti Indonesia. Masalah kemiskinan sudah menjadi masalah yang kompleks sehingga suatu negara tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi kemiskinan secara sendirian.

Secara umum, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat atau ketidakmampuan dari pekerjaan yang dimiliki untuk menghasilkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Kemiskinan adalah “standar tingkat hidup yang rendah karena kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang bila dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku di masyarakat sekitarnya”.<sup>1</sup>

“Kemiskinan sudah menjadi kondisi yang biasa bagi negara berkembang seperti Indonesia. Masih banyak sekali rakyatnya yang hidup dibawah garis kemiskinan dan hidup dalam keadaan yang tidak selayaknya. Saat ini 32,5 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dan sekitar dari seluruh rumah tangga tetap berada di sekitar garis kemiskinan nasional (Rp 200.262/bulan). Bank dunia juga menetapkan bahwa seseorang dianggap miskin jika ia memiliki pendapatan kurang dari US \$2 Dollar per hari”.<sup>2</sup> Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah penduduk di Indonesia yang ada di garis kemiskinan pada tahun 2013 per September 2013 adalah 28,55 juta.<sup>3</sup> Jumlah ini berarti 11,47% dari keseluruhan penduduk

<sup>1</sup> Pengertian Kemiskinan Menurut Para Ahli” diakses pada 25 Mei 2022 <http://dilihatya.com/2146/Pengertian-Kemiskinan-Menurut-Para-Ahli>

<sup>2</sup> Edi Suharto, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, ( Bandung: Alfabeta. 2009). Hal 15, diakses pada 25 Mei 2018 <http://www.jakarta.go.id/v2/news>

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik “ diakses 25 Mei 2022 <https://www.bps Idonesia.go.id>



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Indonesia. Belum lagi ketika meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri sejalan naiknya harga minyak dunia, yang berlanjut pada krisis pangan dan gejolak ekonomi global telah berpengaruh terhadap tingginya angka penduduk miskin di Indonesia. Tingginya angka penduduk miskin akan menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya manusia dan menjadikan semakin lemahnya daya saing bangsa.<sup>4</sup>

Kemiskinan berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan dapat ditimbulkan akibat dari kualitas sumber daya manusia yang rendah dan tidak menutup kemungkinan menjadi pemicu kemiskinan. Menurut teori human capital kualitas sumber daya manusia selain ditentukan oleh kesehatan, juga ditentukan oleh pendidikan. Pendidikan dipandang tidak hanya juga dapat menambah pengetahuan tetapi dapat juga meningkatkan keterampilan, pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas. Produktivitas yang dimaksud yaitu, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penghasilan, dan kesejahteraan. Dalam upaya meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan di bidang perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 menerbitkan Program Keluarga Harapan (PKH). Seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (9) UU No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menentukan bahwa: “Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.”<sup>5</sup>

Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik pusat maupun di daerah. Pada pelaksanaannya PKH ini dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga seperti, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Kepala Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja dan

<sup>4</sup> Eviana Natasia Sembiring, Skripsi berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Medan Batu Kota Medan “ Ilmu Administrasi Negara/FISIP, Universitas HKBP Nommensen. Medan.

<sup>5</sup> Kementerian Sosial. “Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.” Diakses 26 Mei 2018  
dari <https://www.kemsos.go.id/UU-Kesos-No11-2009.pdf>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transmigrasi, Badan Pusat Statistik (BPS), PT POS Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia.

Program ini memberikan bantuan uang secara tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan catatan harus mengikuti persyaratan yang diwajibkan. Adapun persyaratan yang dimaksud yaitu terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu kesehatan dan pendidikan. Sasaran atau penerima bantuan ini adalah KPM yang memiliki anggota keluarga berusia 0-15 tahun dan Ibu hamil.

Program Keluarga Harapan sebenarnya telah dilaksanakan di berbagai negara, khususnya negara-negara Amerika Latin dengan nama program yang bervariasi. Namun secara konseptual, istilah aslinya adalah Conditional Cash Transfers (CCT), yang diterjemahkan menjadi Bantuan Tunai Bersyarat. Program ini tidak sama dengan program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.<sup>6</sup>

Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No. 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang Tim Pengendali Program Keluarga Harapan, Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH). PKH dibentuk sejak 2007 silam dan berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di pusat maupun di daerah. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Provinsi dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD, sedangkan untuk kabupaten/kota dilaksanakan berdasarkan

<sup>6</sup> Kementerian Sosial, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial, 2013. Hal 13





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD.<sup>7</sup>

Tujuan utama dari PKH adalah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut senada dengan upaya percepatan pencapaian target Millenium Developmen Goals (MDGs). Dimana secara khusus tujuan PKH meningkatkan kondisi sosial ekonomi KSM, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KSM, meningkatkan status kesehatan gizi Ibu hamil, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan KSM.

Selain itu tujuan lainnya adalah dibidang kesehatan Ibu dan anak. Meningkatkan status kesehatan Ibu dan anak di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventive (pencegahan). Kesehatan merupakan kekayaan yang sejati dan kunci untuk melakukan aktivitas, sebab dengan sehat individu dapat melakukan kegiatan perekonomian untuk memenuhi kebutuhannya. Kesehatan juga faktor penentu bagi kesejahteraan sosial. Orang yang sejahtera bukan saja orang yang memiliki pendapatan atau rumah memadai, melainkan pula orang yang sehat, baik jasmani maupun rohani.

Program Keluarga Harapan ini mulai diberlakukan di Kabupaten Kampar pada tahun 2007 yang sebagai daerah percontohan dengan total 21 kecamatan. Kabupaten Kampar dijadikan salah satu daerah sasaran Program Keluarga Harapan mengingat kondisi kemiskinan di daerah ini masih cukup tinggi, dimana menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar 271.050 kk masyarakat miskin dan 26.794 KK jiwa yang menerima bantuan PKH per tahun 2019 terdapat sekitar 11,5 % a dari total 734.948 jiwa penduduk dandalam garis kemiskinan. Kondisi kemiskinan ini menyebabkan banyak

<sup>7</sup> Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang Tim Pengendali Program Keluarga Harapan, Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 024/HUK/2008 tentang Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH). Diakses 26 Mei 2018 dari <http://keluargaharapan.com/dasar-pelaksanaan-pkh-landasan-program-keluarga-harapan/>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga miskin yang tidak dapat mengakses pendidikan dan kesehatan secara layak.<sup>8</sup>

Walaupun telah berjalan selama Duabelas tahun, PKH Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Program ini masih perlu diperluas sehingga mampu mencakup sebagian besar rumah tangga miskin di Indonesia: program ini memerlukan banyak peningkatan efisiensi: harapan- harapan yang adapun harus mempertimbangkan proses pelepasan dan transisi bagi penerima manfaat PKH; dan yang terakhir, PKH perlu meningkatkan koordinasinya dengan program- program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial lainnya. Disamping tantangan-tantangan tersebut, PKH tetap menjadi program yang sangat penting bagi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Bagaimanapun reformasi program yang efisien dan efektif masih dibutuhkan secara terus menerus.

Hal yang sama terjadi di Kabupaten Kampar, ada 11 Kecamatan yang telah memberlakukan Program Keluarga Harapan ini. Salah satunya adalah Kecamatan Kampar Kiri Tengah. Di kecamatan ini masih terdapat banyak sekali probelam tika dalam penyaluran bantuan PKH. Fenomena yang tampak di kecamatan Kampar Kiri Tengah ada begitu banyak masyarakat miskin yang belum menerima bantuan ini, melainkan masyarakat mampu yang menerima bantuan PKH. Pada dasarnya Bansos atau bantuan sosial adalah berbagai bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga lainnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Bentuk bansos bisa berupa uang tunai, barang, atau layanan. Hal itu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, atau memberikan bantuan dalam situasi darurat.

Pada tahun 2016 Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bina Baru berjumlah 170 orang, yang tergolong masyarakat kurang mampu dalam kehidupan berkeluarga. Pada tahun 2022 Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) berjumlah 167 orang. Pada 10 tahun yang

<sup>8</sup> <https://kominfosandi.kamparkab.go.id/2019/05/03/sebanyak-26-794-kk-di-kab-kampar-terima-program-pkh-tahun-2019/> hari selasa 15/11/2022



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salu penerima menerima bantuan PKH dan pada tahun ini pun masyarakat tersebut masih ada yang menerima bantuan PKH karna namanya masih tercantum dalam data penerima bantuan maupun ada yang mengeluarkan diri dari keanggotaan penerima bantuan tersebut.

Maka dengan ini saya mengangkat judul proposal Skripsi saya yang berjudul **“PERAN PENDAMPING PKH DALAM PROGRAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DIDESA BINA BARU KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH”**

#### 1. Penegasan Istilah

##### 1. Pendampingan PKH

Pendampingan merupakan strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Menurut Sumodiningrat pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan. Pendampingan dalam lingkup sosial sendiri diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program.

##### 2. Program Penyaluran Bantuan Sosial

Penyaluran adalah sesuatu yang disalurkan atau sebuah pemberian baik dalam bentuk material maupun nonmaterial, sebuah uluran tangan yang disalurkan dari satu pihak ke satu pihak lainnya maupun ke berbagai pihak. Bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Permendagri, 2011) adalah pemberian bantuan berupa uang atau sembako dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, dan atau masyarakat yang sifatnya selektif. Definisi bantuan sosial Menurut Pusat Penyuluhan Sosial (Trisanto, 2020) merupakan program transfer dana atau barang yang dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dengan mendistribusikan kemakmuran dan melindungi rumah tangga dari perubahan kondisi pendapatan, dimana bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi tingkat minimum hidup layak, dan tingkat minimum nutrisi, serta membantu rumah tangga untuk mengantisipasi risiko yang ada.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Tujuan umum PKH adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengubah pandangan, sikap serta perilaku rumah tangga sangat miskin (RTSM) untuk lebih dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan. Program keluarga Harapan memberi manfaat jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendek, Program Keluarga Harapan akan memberikan income effect kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Sedangkan untuk jangka panjang program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak miskin di masa depan serta memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya kelak (*insurance effect*).

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang di kemukakan penulis diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu:

Bagaimana Peran pendamping PKH dalam penyaluran bantuan sosial di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah?

### 1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

#### 4.1 Tujuan penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah yang sudah disebutkan diatas maka dijelaskan tujuan penelitian sebagai berikut :

Untuk mengetahui peran pendamping PKH dalam program penyaluran bantuan sosial di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah

#### 4.2 Kegunaan penelitian

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi atau sumbangsih pemikiran khususnya kepada masyarakat tentang Problematika Pendampingan PKH dalam Program Penyaluran Bantuan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial di Desa Bina Baru dan sebagai masukan bahan evaluasi oleh pemerintah desa.

- b. Secara akademis, sebagai ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan referensi, juga memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi di jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

### Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi penulisan dalam 6 (enam) BAB uraian sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, alasan memilih judul, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang kajian terdahulu, landasan teori, konsep operasional, dan kerangka pikir.

#### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjabarkan tentang desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data serta teknik analisis data.

#### **BAB IV: GAMBARAN UMUM**

Terdiri dari gambaran umum subyek penelitian.

#### **BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

#### **BAB IV: PENUTUP**

Terdiri dari kesimpulan dan saran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hafizah Hayati, 2014 yang berjudul Sinergi Lembaga-Lembaga Pemerintahan/Bumn Dalam penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (Pkh). Penelitian ini membahas tentang sinergi yang dihasilkan melalui tugas masing-masing lembaga-lembaga pemerintahan/BUMN dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Samarinda. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Samarinda. Analisis data diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian, dengan menentukan pihak-pihak yang menjadi narasumber Purposive Sampling untuk mendapatkan data yang jelas dan akurat mengenai sinergi Lembaga-Lembaga Pemerintahan/BUMN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi Lembaga-Lembaga Pemerintahan/BUMN telah bersinergi dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Samarinda yang dapat dilihat melalui indikator saling bekerjasama antara Lembaga-Lembaga Pemerintahan/BUMN dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui rapat pertemuan serta tersedianya layanan pendidikan dan kesehatan bagi penerima bantuan atau peserta PKH, terjalin situasi saling mendukung antara UPPKH (Unit Pengendali Program Keluarga Harapan) dan PT. Pos Indonesia dengan saling membantu saat penyaluran bantuan berlangsung di lapangan sesuai tugas masing-masing, serta adanya koordinasi yang baik antara Dinas Kesejahteraan Sosial dan UPPKH (Unit Pengendali Program Keluarga Harapan) dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga terciptanya pengawasan yang baik antara Dinas Kesejahteraan Sosial dan UPPKH (Unit Pengendali Program Keluarga Harapan) dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Samarinda.<sup>9</sup>. Persamaan dengan penelitian ini adalah topik penelitian yaitu program keluarga harapan, sementara perbedaannya adalah subjek penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan Riska Nandini, 2022, yang berjudul Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. Jumlah penduduk Desa Genteng tercatat sekitar 6.500 jiwa dan mata pencarian warga didominasi oleh petani dan buruh tani. Secara garis besar tingkat perekonomian masyarakat di Desa Genteng masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlebih lagi, Salah satu upaya pemecahan masalah tersebut melalui Program Keluarga Harapan. Dalam pelaksanaan program PKH, terdapat permasalahan konflik sosial yakni ketidakmerataan penyaluran bantuan sosial. Peran pendamping PKH merupakan aktor penting dalam menyukseskan program PKH. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui kajian literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan peran pendamping PKH sudah terlihat baik dalam menjalankan tugas umum, serta menyelesaikan konflik sosial terkait bantuan sosial melalui proses mediasi dan koordinasi agar penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran<sup>10</sup>. Persamaan dalam penelitian ini adalah topik yang di kaji yaitu peran pendamping dalam menyelesaikan konflik PKH. yang membedakan

<sup>9</sup> Hafizah Hayati, Sinergi Lembaga-Lembaga Pemerintahan/Bumn Dalam penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Journal ilmu pemerintahan, Volume 2 No 4, 2014.

<sup>10</sup> Riska Nandini, Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, Jurnal Kolaborasi Resolusi Publik, 4 (1), 2022



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan penelitian selanjutnya adalah teori yang digunakan serta lokasi penelitian.<sup>11</sup>

3. Penelitian yang dilakukan Agnes Carolina Sinaga, 2022, dengan judul Penelitian Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Terhadap Penerima Bantuan Sosial Pkh Di Kota Tebing Tinggi. Untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia pemerintah membuat Program Keluarga Harapan yg dimulai tahun 2007. Salah satu keberhasilan Program Keluarga Harapan dipengaruhi oleh peran pendamping, karena pendamping merupakan pihak yang menghubungkan penerima bantuan dengan pihak terkait lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pendamping di Kelurahan Sri Padang dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam melakukan pendampingan. Penelitian ini menggunakan teori Soerdjono Soekanto dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada pembahasan ini peneliti ingin menyesuaikan termasuk kedalam jenis peran manakah “Peran pendamping program keluarga harapan terhadap penerima bantuan sosial PKH di Kota Tebing Tinggi” dari ke 3 jenis-jenis peran menurut Soerdjono Soekanto adapun jenis-jenis peran yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pendamping PKH Kelurahan Sri Padang termasuk kedalam jenis peran aktif karena pendamping berperan dalam seluruh proses tahapan Program Keluarga berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Persamaan dengan penelitian ini adalah jenis penelitian, adapun yang membedakannya adalah hasil penelitian dan indikator konsep operasional.
4. Penelitian oleh Vivi Anggraini, 2022. Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

<sup>11</sup> Agnes Carolina Sinaga, Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Terhadap Penerima Bantuan Sosial Pkh Di Kota Tebing Tinggi, Skripsi, Universitas Medan Area, 2022

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebagian masyarakat yang tidak bisa menyebutkan apa tujuan dari Program Keluarga Harapan dan minim pengetahuan tentang PKH, pemutkahiran data yang tidak terbaru sehingga penyaluran bantuan sosial PKH yang belum tepat sasaran dimana yang menerima PKH adalah masyarakat yang taraf hidupnya diatas kategori miskin. pengawasan terhadap pemanfaatan dana PKH yang dinilai masih belum sesuai dengan semestinya, dan Program KUBE yang tidak berjalan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Peran Pendamping PKH di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, 2) Untuk mengetahui apa saja penghambat dalam melakukan pendampingan PKH di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini seluruhnya berjumlah 13 orang yang terdiri dari Kasi Kesos Tambang, Pendamping PKH sebanyak 3 orang, masyarakat penerima PKH sebanyak 7 orang, dan masyarakat bukan penerima PKH 2 orang . Berdasarkan wawancara, dokumentasi dan observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa peran pendamping Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sudah berperan dengan baik. Adapun faktor penghambatnya yaitu: KPM tidak hadir sosialisasi, Sosilasaki tidak rutin dilakukan, kurangnya pola pikir penerima PKH tentang penggunaan bantuan PKH sehingga sering disalahgunakan, KPM PKH masih banyak yang belum memiliki KIS, beberapa KPM baru banyak yang tidak masuk SP2D, sehingga saldo mereka nol, kurangnya kesadaran penerima PKH, tidak berusaha untuk meningkatkan perekonomiannya.<sup>12</sup> Yang menyamakan dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian masih lingkup kabupaten yang sama.

<sup>12</sup> Nivi Anggraini, Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar., Skripsi Uin Suska Riau, 2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang membedakan dengan penelitian penulis adalah latar belakang masalah, kondisi sosial masyarakatnya.

5. Penelitian yang dilakukan Raisa Nazifa, 2022, Program Keluarga Harapan Terhadap Masyarakat Miskin Di Gampong Cot Teungoh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie. Dalam proses penyaluran bantuan PKH diperlukan pendamping sebagai fasilitator yang memberikan dukungan maupun motivasi kepada masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sebagai penerima manfaat, sehingga penyalurannya dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Namun, penyaluran bantuan di Gampong Cot Teungoh masih terdapat masyarakat yang menyalahgunakan bantuan PKH serta masih ada masyarakat yang belum paham tentang peruntukannya program bantuan PKH. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aktivitas pendamping dalam penyaluran bantuan PKH terhadap masyarakat di Gampong Cot Teungoh dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pendampingan dan penyaluran bantuan PKH terhadap masyarakat di Gampong Cot Teungoh tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pendamping dalam penyaluran bantuan PKH terhadap masyarakat sudah berjalan dengan lancar, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Adapun faktor penghambatnya masih ada masyarakat yang kurang disiplin dalam proses penyaluran PKH seperti kehadiran dan penyalahgunaan bantuan PKH tersebut. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa aktifitas pendamping dalam penyaluran bantuan program PKH sudah efektif dan efisien serta sudah memenuhi kriteria dan tepat sasaran.<sup>13</sup> Kesamaan dalam penelitian adalah subjek penelitian yaitu pendamping PKH sementara yang membedakannya adalah lokasi penelitian dan fokus penelitian.

<sup>13</sup> Raisa Nazifa, Program Keluarga Harapan Terhadap Masyarakat Miskin Di Gampong Cot Teungoh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, Skripsi, UIN Ar-Raniry Aceh, 2022



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Penelitian yang dilakukan Isti Putri Utami, 2021, Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bandar Lampung serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya.. Metode analisis menggunakan analisis deskriptif dan kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tingkat kinerja pendamping PKH di Kota Bandar Lampung berada pada klasifikasi sedang. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil capaian kerja pendamping dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendamping PKH. Pada pelaksanaan validasi kepesertaan, penyaluran bantuan, pemutakhiran data, dan pelaporan kegiatan diketahui bahwa pendamping telah berhasil melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur. Pada pelaksanaan P2K2, pendamping telah menggunakan media pembelajaran untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan dan telah menyampaikan keseluruhan materi, namun masih dapat dijumpai beberapa pendamping yang belum menyampaikan keseluruhan materi tersebut. Pada pelaksanaan verifikasi komitmen KPM PKH, masih terdapat pendamping yang tidak memantau kunjungan KPM PKH dampingannya pada komponen pendidikan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan non formal, motivasi, disiplin kerja, lingkungan kerja, serta persepsi insentif pendamping terhadap tingkat kinerja pendamping. Hal tersebut memiliki makna bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan non formal, motivasi, disiplin kerja, lingkungan kerja, dan persepsi terhadap insentif pendamping maka semakin tinggi tingkat kinerja pendamping PKH di Kota Bandar Lampung.<sup>14</sup>. Persamaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian, sementara yang membedakannya adalah metodologi penelitian dan rumusan masalah penelitian.

<sup>14</sup> Isti Putri Utami, dkk, Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kota Bandar Lampung, Jurnal sosial Humaniora Dan Pendidikan, 5 (1), 2021





## 2.2 Landasan Teori

Dalam suatu penelitian tidak pernah lepas dengan yang namanya teori agar suatu penelitian dapat dikatakan ilmiah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argementasi, penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika metodologi, argumentasi, asas dan hukum umum yang menjaadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengentahuan, pendapat, cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu.<sup>15</sup>

Teori merupakan serangkaian konsep, definisi yang saling berkaitan biasa sering diungkapkan oleh para ahli yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena, gambaran sistematis ini dijabarkan dan menghubungkan antara variabel yang satu dengan yang lain bertujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut. Ada beberapa teori yang menjadi acuan terhadap permasalahan yang ada.

### 1. Konsep Pendampingan

#### a. Pengertian Pendampingan

Pendampingan berasal dari kata “damping”. Pendampingan adalah suatu proses hubungan sosial antara pendamping dengan korban dalam bentuk pemberian kemudahan untuk memecahkan masalah. Orang yang melakukan pendampingan biasanya disebut dengan pendamping. Sedangkan yang memperoleh pendampingan disebut dengan klien<sup>16</sup>. Dalam pendampingan, pendamping secara berkesinambungan memfasilitasi orang yang didampingi menjadi agen perubahan bagi dirinya dan lingkungannya Mencapai pemahaman diri secara penuh dan utuh Sebuah perubahan untuk pertumbuhan secara penuh dan utuh adalah mengalami pengalamannya secara penuh dan utuh. Antara lain dengan memahami kekuatan dan kelemahan yang

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 177.

<sup>16</sup> Nela Wahyudiarti, ‘Pelaksanaan Program Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (Bkbp) Kabupaten Semarang’, Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, Cd, 2012.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada dalam dirinya, serta kesempatan dan tantangan yang ada di luar dirinya<sup>17</sup>

Menurut Miftahul khair pendampingan adalah salah satu proses dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, melalui kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pendamping hanya memberikan bimbingan, saran, dan bantuan konsultif tidak mempunyai kekuasaan lebih, sedangkan masyarakat yang didampingi dengan pendamping harus memiliki tujuan yang sama<sup>18</sup>

Pendampingan merupakan strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Menurut Sumodiningrat pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan fakir miskin secara optimal. Perlunya pendampingan dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan pemahaman diantara pihak yang memberikan bantuan dengan sasaran penerima bantuan. Pendampingan dalam lingkup sosial sendiri diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Fasilitator juga seringkali disebut fasilitator masyarakat (community facilitator/CF) karena tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri.

Pendamping dapat dipahami sebagai seseorang yang mempunyai kompetensi dan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan dalam menyelenggarakan berbagai pelayanan sosial. Pendamping merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak-pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan

<sup>17</sup> Hajje Nurjannah, 'Pendampingan Atau Lebih Dikenal Dengan Istilah Mentorship', Skripsi, 12-05-2005 (2016), 1–23

<sup>18</sup> Miftahulhair Miftahulhair, „Pendampingan Sosial Terhadap Anak Jalanan Di Rumah Peningkatan Sosial Anak (RPSA) Kota Makassar“, Phinisi Integration Review, 1.2 (2018),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun dengan program di tingkat kabupaten/kota.<sup>19</sup> Tugas dan tanggungjawab pendamping PKH secara umum adalah melaksanakan tugas pendampingan kepada RTSM/KSM peserta PKH. Selain tugas tersebut, pendamping juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat miskin yang menjadi sasaran program. Menurut Habibullah (2011), pendamping PKH memiliki kedudukan sebagai mitra pemerintah dan mitra masyarakat sehingga dituntut untuk menjembatani berbagai kepentingan yang datang dari pemerintah maupun kepentingan masyarakat<sup>20</sup>

Suharto mengurakan bahwa pendampingan merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat,<sup>21</sup> selanjutnya ditambahkan oleh Payne bahwa pendampingan merupakan strategi yang lebih mengutamakan “*making the best of the client's resources*”, Keterlibatan masyarakat sebagai sumber daya manusia untuk memberdayakan dirinya, merupakan potensi untuk mencapai tujuan masyarakat, yaitu dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama masyarakat dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan selanjutnya mendiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan kearah peningkatan kapasitas produktivitas masyarakat.

#### b. Tujuan Pendampingan

Tujuan umum kegiatan pendampingan diantaranya

- 1) Memastikan bahwa perubahan yang konkret terjadi dilingkungan tersebut.

<sup>19</sup> Evi Rahmawati, Bagus Kisworo, Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan, Journal of Nonformal Education and Community Empowerment, Volume 1 No 2, 2017

<sup>20</sup> Habibullah. Peran pendamping pada program keluarga harapan kabupaten karawang. Jurnal Informasi (Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial), Volume 16 No 2, 2011, 100–116

<sup>21</sup> Suharto, Edi. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung. : Refika Aditama. 2005



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Memungkinkan orang-orang yang diajak bekerja untuk menggabungkan kepercayaan dan kemampuan dalam menangani masalah.

Sebuah kelompok perlu didampingi karena mereka merasa tidak mampu mengatasi permasalahan secara sendirian dan pendamping adalah mendampingi kelompok. Dikatakan mendampingi karena yang melakukan kegiatan pemecahan masalah itu bukan pendamping. Pendamping hanya berperan untuk memfasilitasi bagaimana memecahkan masalah secara bersama-sama dengan masyarakat, mulai dari tahap mengidentifikasi permasalahan, mencari alternatif pemecahan masalah sampai pada implementasinya.

#### c. Peran Pendampingan

Peran pendamping dibagi menjadi 4 yaitu:

##### 1) Fasilitator

Fasilitator adalah individu yang memfasilitasi proses belajar, diskusi, dan pengambilan keputusan dalam suatu kelompok. Dalam pemberdayaan masyarakat, fasilitator membantu masyarakat mengenali potensi, mengatasi masalah, dan mengambil keputusan bersama. Menurut Suharto (2005), fasilitator adalah agen perubahan yang bertugas memfasilitasi proses sosial agar masyarakat mampu memecahkan masalahnya sendiri.<sup>22</sup> Sementara menurut Chambers (1993), fasilitator harus bertindak sebagai enabler, bukan doer, yaitu mendorong masyarakat bertindak sendiri.<sup>23</sup>

Dalam hal ini fasilitator juga mempunyai tugas dan perannya:

- Membuka ruang dialog dan partisipasi
- Menggali potensi dan kebutuhan masyarakat
- Mengembangkan kapasitas kelompok

<sup>22</sup> Suharto, Edi. (2005). \*Kebijakan Sosial: Perspektif Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan\*. Bandung: Alfabeta

<sup>23</sup> Chambers, Robert. (1993). \*Challenging the Professions: Frontiers for Rural Development\*. London: ITDG Publishing.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Menjaga netralitas
- Menghubungkan masyarakat dengan sumber daya

#### 2) Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang bersifat netral dan berperan menjembatani pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda untuk mencapai kesepakatan atau solusi bersama tanpa memihak. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pendamping sebagai mediator membantu menyelesaikan konflik internal masyarakat, menghubungkan masyarakat dengan pemerintah atau lembaga lain, serta mempertemukan kepentingan antara kelompok yang berbeda. Menurut Moore (2003), mediator adalah pihak yang memfasilitasi komunikasi, membantu pihak yang berselisih memahami sudut pandang satu sama lain, dan mencari jalan tengah secara sukarela dan non-paksaan.<sup>24</sup>

Tugas mediator yaitu:

- Menjembatani komunikasi antar pihak
- Menyelesaikan konflik sosial
- Menyusun kesepakatan bersama
- Meningkatkan kepercayaan dan kerja sama
- Netral dan tidak memihak

#### 3) Edukator

Edukator adalah seseorang yang bertugas untuk memberikan pendidikan, pelatihan, dan penyadaran kepada masyarakat agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan dalam kehidupan. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pendamping sebagai edukator berperan untuk mentransformasikan pengetahuan secara partisipatif sehingga masyarakat mampu berpikir kritis, mandiri, dan bertindak

<sup>24</sup> Moore, C. W. (2003). \*The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict\*. San Francisco: Jossey-Bass.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan informasi yang benar. Menurut Paulo Freire (1970), edukasi bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi merupakan proses dialogis untuk membangkitkan kesadaran kritis masyarakat (conscientization) terhadap realitas sosialnya.<sup>25</sup>

Tugas pendamping sebagai edukator yaitu:

- Memberikan informasi dan pengetahuan
- Meningkatkan kesadaran kritis
- Mengembangkan keterampilan
- Mendorong perubahan sikap
- Memfasilitasi pembelajaran partisipatif

#### 4) Motivator

Motivator adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk membangkitkan semangat, memberikan inspirasi, dan mendorong individu atau kelompok untuk bertindak mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pendamping sebagai motivator berperan menumbuhkan kepercayaan diri, membangun harapan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perubahan sosial. Menurut Robbins dan Judge (2013), motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang dalam mencapai tujuan.<sup>1</sup>

Tugas Pendamping sebagai Motivator

- Membangkitkan semangat kolektif
- Mendorong partisipasi aktif
- Membangun kepercayaan diri
- Membantu menetapkan tujuan
- Memberikan penghargaan dan penguatan

<sup>25</sup> Freire, Paulo. (1970). *\*Pedagogy of the Oppressed\**. New York: Herder and Herder.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. Fungsi Dan Model Pendampingan**

Bagi para pekerja sosial di lapangan, kegiatan pemberdayaan di atas dapat dilakukan melalui pendampingan sosial. Terdapat lima kegiatan penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pendampingan sosial

**1) Motivasi**

keluarga miskin dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Rumah tangga miskin perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di Desa atau kelurahannya. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.

**2) Peningkatan Kesadaran Dan Pelatihan Kemampuan**

Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, pemasyarakatan, imunisasi, dan sanitasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan lokal yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan matapencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya

**3) Manajemen Diri**

Dimana kelompok harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4) Mobalisasi Sumber

Merupakan sebuah metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial

#### 5) Pembangunan dan pengembangan Jaringan

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.

#### 6) Animisator

Menciptakan proses yang dapat membantu masyarakat menemukan dan mendayagunakan potensi keswadayaanya untuk mengatasi masalah yang dihadapi<sup>26</sup>

#### e. Pendamping PKH

Pada dasarnya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tak lepas dari seorang pekerja sosial yang disebut pendamping PKH. Rahmati<sup>27</sup> disebutkan bahwa Pendamping PKH adalah sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrak kerjanya yang ditetapkan oleh kementerian sosial sebagai pelaksana pendamping PKH di tingkat kecamatan. Menurut Habibullah pendamping PKH memiliki kedudukan sebagai mitra pemerintah dan mitra masyarakat sehingga dituntut untuk menjembatani berbagai kepentingan yang datang dari pemerintah maupun kepentingan masyarakat.<sup>28</sup> Keberhasilan

<sup>26</sup> Edi, Suharto. Membangun Masyarakat Memberdayakan rakyat kajian strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial. Bandung : PT Refika Aditama, 2010

<sup>27</sup> Ivi Rahmawati dkk, " Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan" Jurnal of Nonformal Education and Empowerment", Vol. 1, No 2, 2017 hal.

<sup>28</sup> Habibullah. Peran Pendamping pada Program Keluarga Harapan di Kabupaten Karawang. INFORMASI: Permasalahan Dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 16(02), 2011, 101–116.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlaksananya Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat dari kinerja seorang pendamping PKH dalam memberikan pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam Jurnal Manajemen Indonesia yang ditulis oleh Muhammad Sahem,dkk disebutkan bahwa kinerja pendamping PKH ditinjau dari aspek kualitas tedapt banyak hal yang masih harus ditingkatkan terutama mengenai validasi dan pembaharuan data keluarga penerima manfaat di suatu wilayah.<sup>29</sup>

## 2. Konsep Program Keluarga Harapan

### a. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) atau dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH bukan merupakan lanjutan program Subsidi Langsung Tunai yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu RTM mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun system perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster I strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan pemenuhan dasar bagi lansia dan penyandang disabilitas berat. Pelaksanaan PKH juga mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Millenium. Lima kompenen tujuan Millenium Development Goals (MDGs) yang akan terbantu oleh PKH yaitu: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan jender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, pengurangan angka kematian ibu melahirkan.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Muhammad Sahem, Servant Leadership dan Kompetensi Komunikasi:Dampaknya terhadap Kepuasan dan Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Aceh Utara, Jurnal Manajemen Inonesia, Volume 5 No 1, 2021.

<sup>30</sup> INP2K, Panduan Umum, Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial penduduk miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong mata rantai kemiskinan yang terjadi selama ini

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan yang termasuk dalam klaster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Tujuan umum PKH adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengubah pandangan, sikap serta perilaku rumah tangga sangat miskin (RTSM) untuk lebih dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan (Direktorat Jaminan Sosial, 2012: 1). Kesenambungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan milenium atau MDGs (Millenium Development Goals). Setidaknya ada lima komponen tujuan MDGs yang didukung melalui PKH, yaitu Penanggulangan kemiskinan ekstrim dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pengurangan angka kematian anak, dan peningkatan kesehatan ibu (Direktorat Jaminan Sosial, 2013: 2).

Peserta PKH memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mendapatkan haknya, khususnya kewajiban yang terkait dengan kesehatan dan pendidikan. Kewajiban di bidang kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, pemberian asupan gizi dan imunisasi anak balita sehingga dapat mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian balita sesuai program prioritas dalam pencapaian indikator MDGs (Direktorat Jaminan Sosial, 2012: 1). Di bidang pendidikan, peserta PKH memiliki kewajiban terkait dengan menyekolahkan anak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke sekolah dasar, lanjutan dan menengah (SD sampai dengan SMA) termasuk anak dengan disabilitas. Selain mendaftarkan peserta didik, peserta didik yang termasuk anggota PKH tersebut harus memenuhi jumlah kehadiran yang ditetapkan dalam program yaitu minimal 85% dari hari belajar efektif dalam sebulan, dengan demikian diharapkan kualitas pendidikan akan meningkat (Direktorat Jaminan Sosial, 2012: 4-5).

Program keluarga Harapan memberi manfaat jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendek, Program Keluarga Harapan akan memberikan income effect kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Sedangkan untuk jangka panjang program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak miskin di masa depan serta memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya kelak (insurance effect).

Secara faktual dan menurut teori yang ada, tingkat kemiskinan suatu rumah tangga secara umum terkait dengan tingkat kesehatan dan pendidikan. Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, untuk tingkat rendah sekalipun. Pemeliharaan kesehatan ibu hamil pada keluarga sangat miskin sering tidak memadai sehingga menyebabkan buruknya kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan dan bahkan berdampak pada tingginya kematian bayi (Direktorat Jaminan Sosial, 2012: 4).

Sebagian dari anak-anak keluarga sangat miskin, ada juga yang sama sekali tidak mengenyam bangku sekolah karena harus membantu mencari nafkah untuk keluarga. Meskipun angka partisipasi sekolah dasar tinggi, namun masih banyak anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lanjutan (SMP/Mts) apalagi ke jenjang menengah atas (SMA). Kondisi ini menyebabkan kualitas



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

generasi penerus keluarga miskin senantiasa rendah dan akhirnya terperangkap dalam lingkaran kemiskinan.

Dari sudut pandang kebijakan, PKH merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin. PKH yang mewajibkan RTSM memenuhi kewajibannya di bidang kesehatan dan pendidikan akan membawa perubahan perilaku RTSM/KSM terhadap pentingnya kesehatan dan pendidikan.

Pada akhirnya, implikasi positif dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan harus bisa dibuktikan secara empiris. Untuk itu, pelaksanaan PKH juga akan diikuti dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang anggarannya bersumber dari APBN, dan melibatkan berbagai sektor yang di dalamnya memerlukan kontribusi dan komitmen Kementerian/Lembaga meliputi: Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, TNP2K, BPS dan Pemerintah Daerah serta Lembaga Keuangan dalam penyaluran bantuan bagi peserta PKH (Direktorat Jaminan Sosial, 2013: 12).

Bantuan yang tercakup dalam Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan. Termasuk akses terhadap berbagai



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional

#### b. Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan

Peserta PKH adalah rumah tangga sangat miskin/keluarga sangat miskin (RTSM/KSM) yang sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program, yaitu:

- a) Memiliki ibu hamil/ibu nifas/anak balita
- b) Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah)
- c) Memiliki anak SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun)
- d) Memiliki anak SMP/Mts/Paket B/SMLB (usia 12-15 tahun) dan
- e) Memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, termasuk anak dengan disabilitas (Direktorat Jaminan Sosial, 2013: 19).

#### c. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama pada kelompok RTM. Tujuan khusus PKH meliputi empat hal yaitu:

- 1) Meningkatkan status sosial ekonomi RTM.
- 2) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar.
- 3) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTM.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan anak-anak RTM.<sup>31</sup>

### 3. Konsep Penyaluran

#### a. Pengertian Penyaluran

Penyaluran secara umum diartikan sebagai suatu proses mengalirkan atau mendistribusikan barang, jasa, dana, atau informasi dari suatu pihak ke pihak lain melalui mekanisme tertentu yang bertujuan agar dapat diterima secara tepat oleh sasaran yang dituju. Penyaluran memiliki dimensi teknis dan sosial, karena tidak hanya mencakup aspek distribusi logistik, tetapi juga aspek keadilan, efisiensi, dan transparansi dalam pelaksanaannya.<sup>32</sup>

Dalam konteks pemerintahan dan pelayanan publik, penyaluran berperan sebagai jembatan antara perencanaan dan penerimaan hasil oleh masyarakat. Proses ini sangat krusial karena menentukan apakah bantuan, layanan, atau sumber daya benar-benar sampai kepada yang berhak menerimanya.<sup>33</sup> Sedangkan Menurut Soetomo, penyaluran adalah bagian dari proses sosial dalam pemberdayaan masyarakat yang melibatkan pendistribusian sumber daya, baik berupa barang maupun jasa, dari pemerintah atau lembaga ke masyarakat. Proses ini harus memperhatikan prinsip keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan.

“Penyaluran bantuan sosial yang dilakukan tanpa partisipasi aktif dari masyarakat hanya akan menghasilkan ketergantungan dan tidak menyelesaikan akar masalah kemiskinan.”<sup>34</sup>

#### b. Tujuan Penyaluran

- Menjamin Tepat Sasaran

Agar bantuan sampai pada penerima yang benar-benar membutuhkan berdasarkan kriteria dan data valid.

- Efektivitas Program

<sup>31</sup> Ibid. hlm. 5

<sup>32</sup> KBBI. (2024). Penyaluran. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

<sup>33</sup> Kementerian Sosial RI. (2020). Pedoman Umum Penyaluran Bansos Tunai dan Sembako.

<sup>34</sup> Soetomo. (2011). Pemberdayaan Masyarakat: Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyaluran yang baik meningkatkan efektivitas capaian program, mengurangi pemborosan, dan memastikan hasil nyata.<sup>35</sup>

- **Pemerataan dan Keadilan Sosial**  
Tujuannya adalah menciptakan keadilan distribusi bagi kelompok marginal, rentan, dan miskin.
- **Transparansi dan Akuntabilitas**  
Agar masyarakat dapat mengawasi dan mengetahui alur bantuan yang disalurkan.
- **Meningkatkan Partisipasi Masyarakat**  
Melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan agar muncul rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama.

#### c. Komponen Penting Dalam Penyaluran

Berikut komponen utama dalam proses penyaluran menurut pendekatan sistem (Systems Theory):

Tabel 2.1  
Komponen PKH

Komponen	Penjelasan
Input	Sumber daya yang akan disalurkan, seperti dana, bantuan pangan, layanan kesehatan, dll.
Saluran Penyaluran (Channel)	Jalur distribusi seperti bank, kantor pos, e-wallet, lembaga sosial, atau pendamping lapangan.
Aktor Penyalur (Agency)	Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyaluran seperti pemerintah daerah, pendamping PKH, LSM, dan relawan.
Target/Penerima Manfaat	Individu atau kelompok masyarakat miskin, rentan, lansia, disabilitas, dll.
Kontrol dan Evaluasi	Sistem monitoring dan pelaporan untuk memastikan proses berjalan sesuai SOP.
Lingkungan	Faktor sosial, politik, dan budaya yang memengaruhi proses penyaluran. <sup>36</sup>

<sup>35</sup> Kementerian Sosial RI. (2020). Pedoman Umum Penyaluran Bansos Tunai dan Sembako.

<sup>36</sup> Bertalanffy, L. von. (1968). General System Theory: Foundations, Development, Applications. George Braziller.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Tantangan Dalam Penyaluran

##### 1. Ketidaktepatan Sasaran

Banyak kasus bantuan salah sasaran karena data tidak diperbarui (data inclusion dan exclusion error). Contoh: Nama warga mampu masuk dalam daftar penerima, sedangkan warga miskin tidak.<sup>37</sup>

##### 2. Keterbatasan Infrastruktur

Terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), penyaluran sering terhambat akses transportasi dan logistik.

##### 3. Korupsi dan Pungli

Praktik penyimpangan oleh oknum pejabat atau pelaksana di lapangan yang mengambil sebagian dana bantuan.

##### 4. Kurangnya Sosialisasi dan Literasi

Banyak penerima bantuan yang tidak tahu hak dan prosedur sehingga menjadi pasif atau terjebak informasi palsu.

##### 5. Birokrasi yang Lambat dan Berbelit

Sistem administrasi yang tidak efisien memperlambat penyaluran.

##### 6. Keterbatasan Kapasitas SDM

Petugas penyalur kadang kurang pelatihan, minim integritas, atau overload tugas.

#### 4. Konsep Bantuan Sosial

##### a. Pengertian dan Bentuk Bantuan Sosial

Bantuan Sosial Menurut Permendagri No. 32 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Permendagri No. 32 Tahun 2011, bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Berdasarkan pengertian bantuan sosial tersebut, yang menjadi tujuan

<sup>37</sup> PNP2K. (2021). Basis Data Terpadu dan Tantangannya dalam Penyaluran Bantuan Sosial. Jakarta.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pemberian bantuan sosial adalah untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Resiko sosial sesuai Pasal 1 angka 16 Permendagri No. 32 Tahun 2011 adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (1) Permendagri No. 32 Tahun 2011, bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang atau barang. Permendagri No. 39 Tahun 2012 tidak merubah ketentuan dalam Permendagri No. 32 Tahun 2011 terkait pengertian dan bentuk bantuan sosial tersebut.

#### b. Sifat dan Kriteria Bantuan Sosial

Sifat dan kriteria bantuan sosial diatur dalam Bab IV Permendagri No. 32 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012 sebagai berikut:

- 1) Bantuan sosial dapat diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat oleh Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasonalitas dan manfaat untuk masyarakat.<sup>38</sup>
- 2) Anggota/kelompok masyarakat yang dapat diberikan bantuan sosial meliputi:<sup>39</sup>
  - a) Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial,

<sup>38</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal Pasal 22.

<sup>39</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal Pasal 23.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

- b) Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 3) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga terbagi atas:<sup>40</sup>
  - a) Bantuan sosial yang direncanakan sebelumnya.  
Bantuan sosial yang direncanakan sebelumnya dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
  - b) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.  
Bantuan sosial yang tidak dapat di rencanakan sebelumnya di alokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan keluarga yang bersangkutan. Pagu alokasi anggaran bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial berupa uang yang direncanakan sebelumnya.
- 4) Kriteria minimal pemberian bantuan sosial sebagai berikut:<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal Pasal 23A.

<sup>41</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal Pasal 24 dan Pasal 25.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Selektif, yaitu bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
  - b) Memenuhi persyaratan penerima bantuan, yaitu memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
  - c) Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Kriteria tersebut diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu, yaitu bantuan sosial diberikan sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 5) Sesuai tujuan penggunaan, yaitu:
- a) Rehabilitasi sosial, yaitu ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - b) Perlindungan sosial, yaitu ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - c) Pemberdayaan sosial, yaitu ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah social mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - d) Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - e) Penanggulangan kemiskinan, yaitu kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

f) Penanggulangan bencana, yaitu serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

6) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial, dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- b) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

### 2.3. Konsep Operasional

Operasional adalah suatu konsep yang bersifat abstrak guna memudahkan pengukuran suatu variabel. Operasional juga dapat diartikan sebagai suatu pedoman dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan penelitian. Konsep operasional dibagi menjadi peran pendamping dalam mengatasi problematika pendampingan PKH dalam program penyaluran Bantuan Sosial DiDesa Bina Baru. Diantaranya sebagai berikut :

- 1) Fasilitator
- 2) Mediator

<sup>42</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal Pasal 26.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Edukator
- 4) Motivator

### 2.4. Kerangka Berfikir

Menurut Uma Sekaran (1992) dalam Sugiyono (2011) Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan beragam faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kerangka berpikir ialah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Dimana kerangka berpikir inilah yang mengarahkan peneliti untuk membuat skema. Maka yang dimaksudkan dengan Poblematika Penyaluran PKH adalah menemukan masalah-masalah yang terdapat dalam pendampingan PKH meliputi 4 peran yaitu peran fasilitator, mediator, educator, dan motivator.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

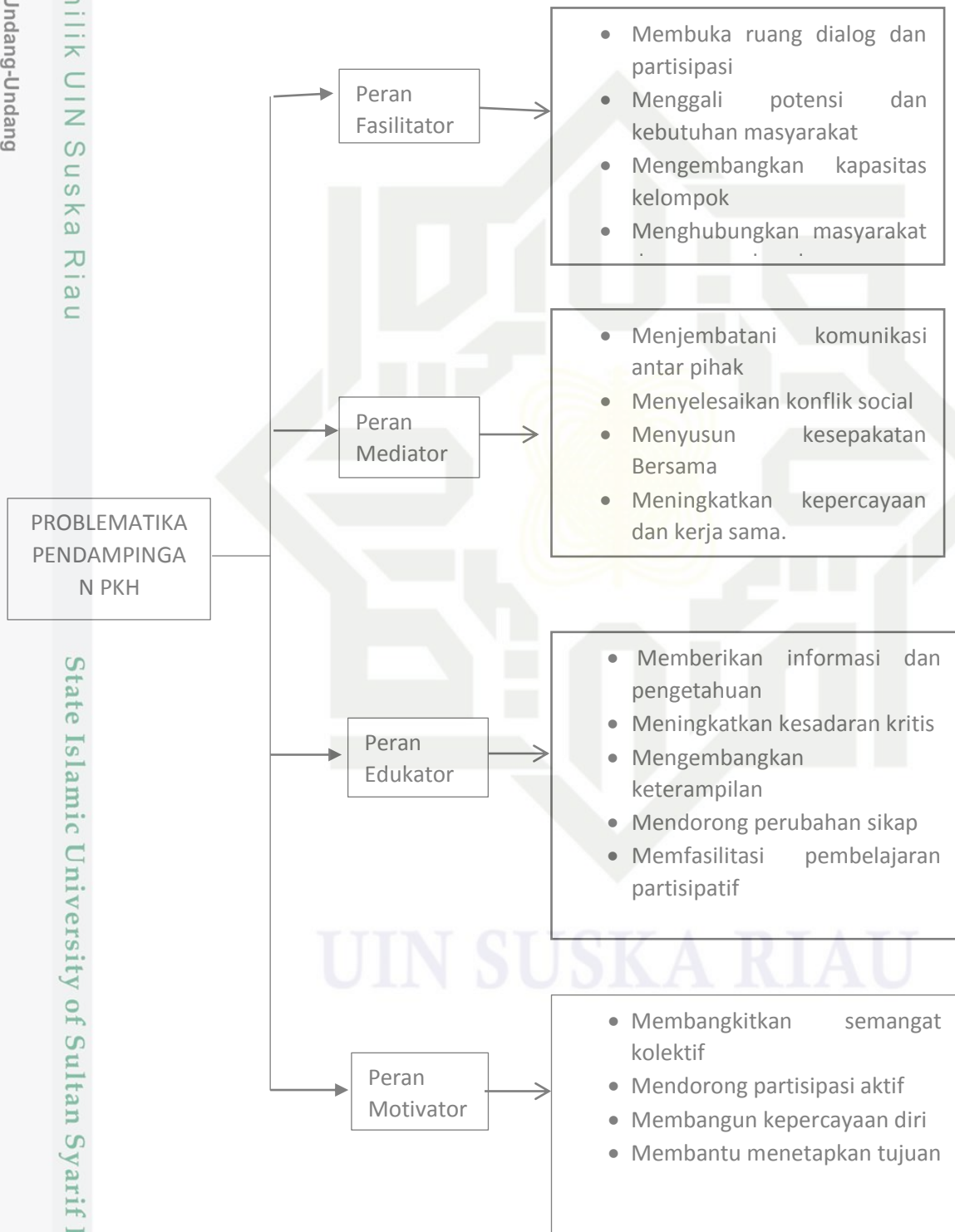
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka berfikir**

Problematika Pendampingan PKH dalam Program Penyaluran Bantuan Sosial Desa Bina Baru





### 3.1 Desain Penelitian

Pengertian desain penelitian adalah rangkaian prosedur dan metode yang dipakai untuk menganalisis dan menghimpun data untuk menentukan variabel yang akan menjadi topik penelitian, dan bisa juga didefinisikan sebagai strategi yang dilakukan peneliti untuk menghubungkan setiap elemen penelitian dengan sistematis sehingga dalam menganalisis dan menentukan fokus penelitian menjadi lebih efektif dan efisien.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, Menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupakata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.<sup>43</sup>

Alasan Penulis memilih metode kualitatif yaitu menurut penulis metode ini yang relevan dan tepat dengan penelitian ini karena penelitian ini mengkaji tentang 6 fungsi indikator kerjasama antar pendamping PKH Dan Pemerintah Desa dalam mengatasi problematika penyaluran PKH, yang kemudian hanya dapat dijawab melalui observasi dan wawancara dengan informan kelapangan untuk mencari data berupa kata tertulis dan fakta yang terjadi di masyarakat.

<sup>43</sup> Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.



### 3.2 Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Penelitian dilakukan mulai 9 Mei 2025 s.d 17 Mei 2025

### 3.3 Sumber Data

Sumber data penelitian berasal dari wawancara kepada 2 org penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu.<sup>44</sup> Informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer di peroleh dari hasil wawancara dengan informan yang mewakili populasi. Informan di tentukan terlebih dahulu dengan menggunakan teknik purposive sampling, dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja berdasarakan kriteria yang telah di tentukan dan menggunakan beberapa orang lain sebagai key informan.<sup>45</sup>

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di kumpulkan atau di peroleh oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data diperoleh dari kepustakaan, studi dokumentasi atau dari laporan penelitian terdahulu. Sehingga data skunder dalam penelitian ini dapat di peroleh melalui catatan-catatan, arsip, dan dokumen-dokumen lain yang dapat di gunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Kaelan, M.s, Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma, 2005) hlm. 58

<sup>45</sup> Ibid, hlm. 60

<sup>46</sup> Ibid hlm. 73





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### 3.4 Subjek dan Objek Penelitian

- Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).  
Berjumlah 1 Orang
  - Kepala Desa Bina Baru  
Berjumlah 1 orang
  - Anggota Program Keluarga Harapan (PKH)  
Berjumlah 5 Orang
- Jadi total semua subjek berjumlah 7Orang

### 3.5 Informan Penelitian

Pemilihan informan dapat didasarkan pada dua aspek yaitu teori dan praduga, yang keduanya berlandaskan pada kedalaman pemahaman atau pengalaman dari responden/informan (bukan didasarkan pada pilihan yang acak). Pemilihan informan berdasarkan teori atau theoretical sampling cocok dilakukan jika tujuan utama pengumpulan data adalah untuk mengembangkan teori secara substantif. Teknik pemilihan informan dengan praduga (A priori sampling) sering digunakan dalam penelitian kesehatan masyarakat yang dilakukan dengan menentukan karakteristik informan berdasarkan masalah dan tujuan penelitian. Misalnya jika penelitian kualitatif bermaksud mendalami perilaku kesehatan dan perilaku remaja pada satu komunitas, maka informan penelitian akan dipilih dari komunitas tersebut (Ulin, Robinson, & Tolley, 2005).

Pemilihan informan pada penelitian kualitatif sepenuhnya ditentukan oleh peneliti, sehingga Patton (2002) menyebutnya dengan purposeful sampling, yaitu memilih kasus yang informatif (information-rich cases) berdasarkan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan peneliti, yang jumlahnya tergantung pada tujuan dan sumberdaya studi.maka dari itu peneliti memilih informan yang lebih mengetahui dan dapat memberikan informasi mengenai Problematika Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Bina Baru Kec. Kampar Kiri Tengah, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi sebagai data primer dalam peneliti ini. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini yaitu,kepala desa dan Pendamping PKH Desa Bina Baru sementara untuk ketua PKH Desa Bina Baru,, serta anggota penerima bantuan PKH termasuk informan pendukung

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan	Posisi
1	Syafrizal	Pendamping PKH	Informan Kunci
2	Udin Jarnuji	Kepala Desa	Informan Tambahan
3	Sarmiati	Anggota PKH	Informan Pendukung
4	Silas	Anggota PKH	Informan Pendukung
5	Wasti	Anggota PKH	Informan Pendukung
6	Ria	Anggota PKH	Informan Pendukung
7	Marsinah	Anggota PKH	Informan Pendukung

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara bertatap muka secara langsung dengan informasi agar mendapatkan data yang lengkap dan mendalam. Penulis mewawancarai, Pendamping program PKH Desa Bina Baru, Ketua PKH Desa Bina Baru, anggota Masyarakat Yang Menerima Program Bantuan PKH.

#### 2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena dan gejala untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>47</sup> Observasi dilakukan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengamati langsung lokasi penelitian dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan yang terjadi. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung pada Desa Bina Baru. Untuk mengamati Objek penelitian secara langsung dan lebih mendalam guna mendapatkan informasi yang akurat.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan instrumen penelitian yang digunakan barang-barang tulis dan sebagai sumber data misalnya: buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan photo, rekaman yang relevan dan lainnya. Teknik

<sup>47</sup> Martono, Metode Penelitian, Pekanbaru:LSFK P 2003, hlm 49

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumentasi dalam penelitian dilakukan untuk mengambil atau mencari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan judul penelitian berdasarkan penelitian tersebut maka dengan ini penulis menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data tentang Manajemen Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Bina Baru.

### 3. Validitas Data

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data yang telah didapat, digunakan langkah-langkah sebagaimana yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba. Untuk menguji keabsahan data atau sekumpulan dari hasil verifikasi diperlukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah terkumpul. Teknik untuk memeriksa atau mengumpul tingkat kredibilitas penelitian ini maka peneliti menggunakan:

- i. Ketekunan pengamatan, yakni memuaskan diri pada persoalan yang dibahas dalam penelitian, ketekunan pengamatan ini dilakukan untuk memahami dan mendapatkan data secara mendalam, disamping itu memang dilakukan untuk mengatasi minimnya waktu penelitian ini. Terutama dilakukan karena sejak awal penelitian ini sudah mengarahkan fokusnya.
- ii. Triangulasi, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan perbandingan terhadap data itu.<sup>48</sup> Pada dasarnya penelitian menggunakan triangulasi ini dengan melakukan pengecekan data atau informasi yang diperoleh dilapangan, baik dengan cara membandingkan (misalnya data hasil pengamatan dengan wawancara), membandingkan apa yang dilakukan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan seterusnya, semakin banyak informan, tentu semakin banyak pula informasi yang penelitian dapatkan.

<sup>48</sup> Prof. Dr. Sugiono, ibid, hlm 125



### 3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan selama di lapangan dan setelah selesai lapangan. Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang di cerita kepada seorang lain. Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisis data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, setelah data yang berasal dari lapangan terkumpul dan disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya peneliti akan menganalisa data tersebut. Analisis data kualitatif bersifat interaktif atau berkelanjutan dan dikembangkan sepanjang program. Dengan menganalisis data sampel mengumpulkan data maka peneliti dapat mengetahui kekurangan data yang harus dikumpulkan.

Teknik analisis data dalam kualitatif, yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

#### 2. Model Data (Data Display)

Langkah kedua dari kegiatan analisis data adalah model data, model sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun dan memperbolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk yang paling sering dari model data kualitatif selama ini adalah teks naratif.

#### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang



dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kuat dan dipercaya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1. Gambaran Umum

Desa Bina Baru adalah merupakan daerah Transmigrasi UPT.I Sei Pagar tahun 1984, yang dihuni oleh 430 Kepala keluarga yang berasal dari daerah Transmigrasi Siak II yang merupakan awal Transmigrasi Pemberangkatan Tahun 1981/1982 yang berasal dari berbagai daerah di pulau jawa diantaranya Kebumen, Nganjuk, Kediri, Banyuwangi, Cilacap, Banjarnegara, dan daerah lainnya termasuk didalamnya juga ada Trans.Lokal, terjadinya perpindahan dari Trans.Siak II ke Trans.UPT I Sei Pagar karena terjadinya banjir yang melanda Trans.Siak II kala itu mengendelamkan semua yang dimiliki oleh warga termasuk rumah dengan waktu yang sangat lama yaitu berbulan-bulan, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan maka Kepala Desa, para tokoh dan para kepala rombongan dari daerah masing-masing melakukan kordinasi dengan dinas transmigrasi untuk mengusulkan pemindahan lokasi tranmigrasi, alhasil secara serentak seluruh warga dipindahkan ke Lokasi Transmigrasi UPT I Sei Pagar, dan setelah adanya penyerahan pembinaan dari dinas transmigrasi ke Pemerintah Kabupaten Kampar pada tahun 1991 maka semenjak tahun itu juga berubah nama dari Trans.UPT I Sei Pagar menjadi Desa Bina Baru. Dari tahun 1984 sampai dengan tahun 2005 Desa Bina Baru berada diwilayah admintrasi Kecamatan Kampar Kiri, dan setelah dilakukannya pemekaran kecamatan maka Desa Bina Baru sekarang berada di wiayah administrasi Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, yang mengepalai 11 Desa diataranya 9 desa eks, tramigrasi dan 2 desa tempatan, Kecamatan Kampar Kiri Tengah merupakan kecamatan permekaran dari kecamatan induknya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Pemerintahan pertama Desa Bina Baru dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa yang saat itu berdasarkan hasil pemilihan masyarakat Desa Binabaru yaitu Bapak M.CIPTOREJO, yang saat itu menjabat selama 8 (delapan) tahun berdasarkan peraturan pemerintah, setelah habis masa jabatan, dilanjutkan oleh Bapak SUKARDI sebagai Penjabat Kepala Desa Binabaru kurang lebih selama



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2(tua) tahun dan pada saat itu berjalan proses pemilihan kepala desa definitif, berdasarkan hasil pemilihan kepala desa maka terpilihlah Bapak SADALI, pada tahun 1999 muncullah penjabat kepala desa yaitu Bapak SUMADI kurang lebih selama 3(tiga) tahun.

Pada tanggal 26 Desember 2002 dilaksanakan pemilihan kepala desa dan dengan hasil Bapak SUMADI menjabat kepala desa definitif, setelah habis masa jabatan beliau maka pada tanggal 7 April 2008 dilaksanakan pemilihan kepala desa dan dengan hasil Bapak SUKENDRO dan dilantik pada tanggal 6 Juni 2008, melanjutkan estafet kepemimpinan Desa Bina Baru 6 (Enam) tahun berikutnya menunggu proses berjalanannya turunan dari Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No ..... Tahun ....., dan sementara posisi kepala desa dijabat oleh Penjabat Kepala Desa Bina Baru Bapak SUTIKNO, dengan masa jabatan 24 Juli 2014 s/d 24 Januari 2015, dan saat ini jabatan kepala dijabat oleh Penjabat Kepala Desa Bina Baru Bapak FAJRI HASBI, dengan masa jabatan kurang lebih 1 (satu) tahun. setelah habis masa jabatan beliau maka pada tanggal 11 November 2015 dilaksanakan pemilihan kepala desa dan dengan hasil Bapak SUKENDRO dan dilantik pada tanggal 18 Desember 2015 - 2021 dengan masa jabatan selama 6 Tahun sebagai kepala desa definitif. Sebelum habis masa jabatan beliau maka pada tanggal 22 Desember 2021 dilaksanakan pemilihan kepala desa pada tanggal 24 November 2021 dengan hasil Bapak UDIN JARNUJI dan dilantik pada tanggal 20 Desember 2021 dengan masa jabatan selama 6 Tahun sebagai kepala Desa definitif.

Batas Wilayah DesaLetak geografi Desa Bina Baru, terletak diantara:

Sebelah Utara	: Desa Karya Bhakti
Sebelah selatan	: Desa Lubuk Sakai
Sebelah Barat	: Desa Koto Damai
Sebelah Timur	: Desa Utama Karya

#### 4.2 Profil Program Keluarga Harapan Desa Bina Baru

Program Keluarga Harapan (PKH) mulai dilaksanakan di Desa Bina Baru sejak tahun 2016. PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Jumlah KPM aktif di Desa Bina Baru per tahun 2024 adalah 170 KPM. Total bantuan sosial yang disalurkan selama satu tahun terakhir (Januari–Desember 2024) mencapai Rp. 255.000.000,-. Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dalam empat tahap per tahun, dan langsung masuk ke rekening masing-masing KPM melalui Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).

Bentuk bantuan yang diterima oleh KPM disesuaikan dengan komponen yang dimiliki, yaitu:

- Komponen pendidikan: anak usia SD, SMP, dan SMA/ sederajat.
- Komponen kesehatan: ibu hamil dan anak balita.
- Komponen kesejahteraan sosial: lansia dan penyandang disabilitas berat.

#### 4.3 Struktur Organisasi Program Keluarga Harapan Desa Bina Baru

Berikut merupakan struktur organisasi PKH tingkat desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar :

Koordinator Kabupaten PKH : Rudi Hartono, S.Sos

Koordinator Kecamatan PKH : Siti Marlina, S.Pd

Pendamping Sosial PKH Desa :Syafrizal, S.Sos

Operator PKH Kecamatan : Dani Firmansyah

Anggota KPM PKH : 170 KPM aktif

#### 4.4 Mekanisme Penyaluran dan Pendampingan

Setiap KPM menerima bantuan berdasarkan kondisi sosial-ekonomi mereka yang telah terverifikasi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pendamping sosial melakukan verifikasi ulang secara berkala dan memberikan pendampingan dalam bentuk:

1. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)
2. Edukasi kesehatan dan gizi
3. Sosialisasi pentingnya pendidikan anak
4. Penguatan ekonomi keluarga melalui program pelengkap (seperti KUBE, UEP)





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

#### 4. Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Meskipun secara umum pelaksanaan PKH di Desa Bina Baru berjalan lancar, masih terdapat beberapa hambatan seperti:

- a. Keterbatasan pemahaman KPM terhadap penggunaan bantuan.
- b. Masalah akses transportasi bagi KPM dari dusun terpencil.
- c. Kendala teknis dalam pencairan dana melalui bank.

Upaya peningkatan efektivitas program terus dilakukan melalui koordinasi antar pihak terkait dan penguatan peran pendamping sosial dalam sosialisasi serta pemberdayaan masyarakat.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Problematika Pendampingan PKH dalam Program Penyaluran Bantuan Sosial di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### a) Peran Fasilitator

Pendamping PKH berperan sebagai fasilitator dalam membuka ruang dialog dan partisipasi masyarakat penerima bantuan. Melalui pertemuan kelompok, sosialisasi, dan komunikasi langsung, pendamping telah membantu menyampaikan informasi terkait penyaluran bantuan sosial PKH. Namun, masih ditemukan kendala berupa kurangnya pembaruan data penerima, sehingga sebagian bantuan tidak tepat sasaran.

#### b) Peran Mediator

Pendamping PKH juga menjalankan peran sebagai mediator dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya, terutama dalam hal penyelesaian konflik data penerima manfaat. Meskipun telah dilakukan musyawarah dan klarifikasi data, kendala teknis dalam penyesuaian data DTKS masih menjadi tantangan besar yang menghambat efektivitas program.

#### c) Peran Edukator

Dalam perannya sebagai edukator, pendamping PKH memberikan edukasi terkait hak dan kewajiban KPM, pentingnya pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan bantuan. Kegiatan P2K2 menjadi sarana edukatif yang rutin dilaksanakan. Namun, efektivitas peran ini masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal peningkatan kesadaran kritis dan kemandirian keluarga penerima manfaat.

Secara umum, pendamping PKH di Desa Bina Baru telah berupaya menjalankan ketiga peran tersebut. Namun, beberapa kendala teknis dan sosial seperti keterbatasan pemahaman masyarakat, data yang tidak valid, dan masih rendahnya partisipasi aktif KPM menjadi problematika yang perlu dibenahi agar



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan dan memutus rantai kemiskinan dapat tercapai secara optimal.

Berbagai solusi sudah dijalankan pendamping melihat fungsi dan peran pendamping sosial dalam hal ini, diantaranya seperti verifikasi ulang, mengurus administrasi dan sistem SigNG, Bantuan ekonomi lainnya seperti Kube dll bagi beberapa KPM, Pelatihan kelompok.

#### 6.2.2 Saran

Melihat dan menganalisis kekurangan dalam penelitian ini maka penulis memberikan saran yang bisa dijadikan masukan bukan hanya oleh masyarakat, pendamping ataupun dinas terkait diantara sebagai berikut:

1. Pendamping bukan hanya bertugas secara administratif namun juga menjadi agent of change dalam bantuan sosial memberikan skill yang dibutuhkan KPM
2. Pihak terkait disarankan memberikan reward kepada pendamping untuk meningkatkan performance kerjanya
3. Kendala teknis bisa di atasi dengan pembaharuan data yang teratur
4. Memberikan sistem pengaduan yang responsif agar masyarakat bisa menyampaikan keluhannya secara tertib



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### DAFTAR PUSTAKA.

- Edi, Suharto, 2009. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, ( Bandung: Alfabeta.
- Edi, Suharto. 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan rakyat kajian strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial. Bandung : PT Refika Aditama
- Evi Rahmawati dkk, 2017. “ Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan” Jurnal of Nonformal Education and Empowerment”, Vol. 1, No 2, 2017 hal. 164
- Evi Rahmawati, Bagus Kisworo, 2017. Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan, Journal of Nonformal Education and Community Empowerment, Volume 1 No 2
- Evyana Natasia Sembiring, 2016. Skripsi berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Medan
- Habibullah. 2011. Peran Pendamping pada Program Keluarga Harapan di Kabupaten Karawang. INFORMASI: Permasalahan Dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 16(02), 2011, 101–116.
- Hafizah Hayati, 2014. Sinergi Lembaga-Lembaga Pemerintahan/Bumn Dalam penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (Pkh). Journal ilmu pemerintahan, Volume 2 No 4
- Hartono, Metode Penelitian, Pekanbaru:LSFK P 2003, hlm 49
- Kaelan, M.s, 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma,
- Kementerian Sosial RI. (2020). Pedoman Umum Penyaluran Bansos Tunai dan Sembako.
- Kementerian Sosial. “Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Komarudin dan Yoke Tjuparmah S, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)
- Leta Wahyudiarti, 2012. ‘Pelaksanaan Program Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Di Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (Bkbpp) Kabupaten Semarang’, Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta
- Miftahulkhair Miftahulkhair, 2018. Pendampingan Sosial Terhadap Anak Jalanan Di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Kota Makassar”, Phinisi Integration Review, 1.2
- Moore, C. W. (2003). \*The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict\*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Muhammad Sahem, 2021. Servant Leadership dan Kompetensi Komunikasi: Dampaknya terhadap Kepuasan dan Kinerja Pendamping P rogram Keluarga Harapan (PKH) di Aceh Utara, Jurnal Manajemen Inonesia, Volume 5 No 1





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarar mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nurhajjah Nurjannah, 2016. 'Pendampingan Atau Lebih Dikenal Dengan Istilah Mentorship', Skripsi, 12.2005
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal Pasal 23.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal Pasal 26.
- Sarah Salsabilah, Lucky Nugroho Zulfahmi, 2023. Kajian Penyaluran Dan Penggunaan Program Keluarga Harapan (Pkh)(Studi Kasus Pada Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan, Jurna Economina, Volume 2 No 6
- Soetomo. (2011). Pemberdayaan Masyarakat: Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Suharto, Edi. (2005). \*Kebijakan Sosial: Perspektif Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan\*. Bandung: Alfabeta
- TNP2K. (2021). Basis Data Terpadu dan Tantangannya dalam Penyaluran Bantuan Sosial. Jakarta.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Lampiran 1 Dokumentasi



Wawancara dengan pendamping pkh bapak Syafrizal S.Sos



Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Udin Jarnuji

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Silas KPM PKH



Wawancara dengan Ibu Sarmiati KPM PKH



Wawancara dengan ibu Ria KPM PKH



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan ibu Marsinah KPM PKH



Wawancara dengan ibu Wasti KPM PKH





## Lampiran 2 Instrumen Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Uraian	Teknik Pengumpulan Data
<p><b>PROBLEMATIKA PENDAMPINGAN PKH DALAM PROGRAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI DESA BINA BARU KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KAB KAMPAR</b></p>	<p><b>PROBLEMATIKA PENDAMPINGAN PKH DALAM PROGRAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL</b></p>	Fasilitator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa peran utama pendamping sebagai fasilitator dalam proses penyaluran bantuan sosial PKH?</li> <li>2. Bagaimana pendamping memastikan komunikasi yang efektif antara pihak penyalur dan KPM?</li> <li>3. Apa tantangan yang pendamping hadapi dalam memfasilitasi proses penyaluran bantuan sosial?</li> <li>4. Apakah kpm merasa terbantu dengan peran pendamping sebagai fasilitator selama proses penyaluran bantuan?</li> <li>5. Apa dukungan yang Anda butuhkan agar peran fasilitator bisa lebih optimal?</li> <li>6. Bagaimana pendamping memfasilitasi Anda dalam memecahkan masalah yang dihadapi terkait bantuan</li> </ol>	<p>Observasi Wawancara Dokumentasi</p>
		Mediator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana proses pendampingan</li> </ol>	<p>Observasi Wawancara</p>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>yang lakukan terhadap KPM dalam penyaluran bantuan sosial?</p> <p>2. Apa saja kendala yang sering pendamping hadapi saat mendampingi KPM dalam penyaluran bantuan?</p> <p>3. Bagaimana pendamping menyikapi ketidaksesuaian data KPM di lapangan?</p> <p>4. Bagaimana pengalaman kpm saat menerima bantuan sosial melalui PKH?</p> <p>5. Apakah pendamping PKH membantu Anda dalam proses pencairan bantuan?</p>	Dokumentasi
	Edukator	<p>1. Apakah pendamping PKH sudah memiliki pemahaman yang cukup terkait regulasi dan dinamika sosial penerima bantuan?</p> <p>2. Apa bentuk edukasi yang seharusnya diberikan kepada pendamping agar mereka lebih efektif di lapangan?</p> <p>3. Apakah pendamping telah</p>	Observasi Wawancara Dokumentasi



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>mampu menjadi agen edukatif bagi KPM?</p> <p>4. apakah KPM perlu mendapatkan pelatihan atau edukasi khusus terkait pengelolaan bantuan?</p> <p>5. Apakah selama ini KPM mendapatkan edukasi atau informasi yang memadai dari pendamping?</p>	
	Motivator	<p>1. Seberapa besar peran motivasi dalam mendampingi KPM selama proses penyaluran bantuan sosial?</p> <p>2. Apa bentuk motivasi yang diberikan kepada KPM agar tidak hanya bergantung pada bantuan sosial?</p> <p>3. Apakah merasa termotivasi untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga setelah menerima bantuan?</p> <p>4. Apakah pendamping cukup memberi motivasi dan semangat selama ini?</p> <p>5. Apa harapan terhadap program ini agar tidak hanya memberikan bantuan, tetapi</p>	<p>Observasi</p> <p>Wawancara</p> <p>Dokumentasi</p>



		juga harapan hidup yang lebih baik?	
--	--	-------------------------------------	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### Lampiran 3 Hasil Wawancara

#### Pertanyaan ke Pendamping PKH

Nama : Syafrizal  
 Usia : 35 tahun  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Pekerjaan : Pendamping PKH

Posisi Dalam Penelitian: Informan Kunci

1. Apa peran utama Anda sebagai fasilitator dalam proses penyaluran bantuan sosial PKH?

Jawaban: Peran saya sebagai fasilitator adalah menjembatani antara KPM dan instansi penyalur. Saya memastikan informasi bantuan tersampaikan dengan jelas, serta membantu proses administrasi agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kebingungan.

2. Bagaimana Anda memastikan komunikasi yang efektif antara pihak penyalur dan KPM?

Jawaban: Kami menggunakan berbagai cara: pengumuman via grup WhatsApp, pertemuan kelompok, dan sosialisasi langsung. Komunikasi dua arah sangat penting agar KPM paham prosedur dan bisa menyampaikan kendala mereka.

3. Apa tantangan yang Anda hadapi dalam memfasilitasi proses penyaluran bantuan sosial?

Jawaban: Tantangannya banyak, seperti KPM yang tidak aktif, perubahan jadwal pencairan yang mendadak, hingga kendala teknis di bank. Kami harus fleksibel dan tetap menjaga komunikasi agar proses tetap berjalan lancar.

4. Bagaimana Anda menangani konflik atau kesalahpahaman antara KPM dan petugas penyalur?

Jawaban: Saya biasanya menjadi penengah. Saya dengarkan kedua pihak, lalu jelaskan posisi masing-masing. Kalau perlu, saya bantu fasilitasi pertemuan atau laporan ke pihak terkait agar masalah cepat selesai.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Apa dukungan yang Anda butuhkan agar peran fasilitator bisa lebih optimal?

Jawaban: Kami butuh pelatihan komunikasi, manajemen konflik, serta sistem informasi yang transparan. Juga penting adanya dukungan dari dinas sosial untuk memperjelas kebijakan jika ada perubahan mendadak.

6. Bagaimana proses pendampingan yang Anda lakukan terhadap KPM dalam penyaluran bantuan sosial?

Jawaban: Saya melakukan pendampingan mulai dari sosialisasi jadwal pencairan bantuan, memastikan data KPM valid, mendampingi saat pengambilan bantuan, serta menindaklanjuti jika ada kendala administrasi atau teknis.

7. Apa saja kendala yang sering Anda hadapi saat mendampingi KPM dalam penyaluran bantuan?

Jawaban: Kendala utamanya adalah ketidaksesuaian data, seperti KPM yang sudah pindah atau meninggal, tapi masih tercantum dalam daftar. Selain itu, ada juga masalah jaringan sistem di bank dan keterbatasan komunikasi dengan pihak desa.

8. Bagaimana Anda menyikapi ketidaksesuaian data KPM di lapangan?

Jawaban: Kami melaporkan ke dinas sosial dan melakukan verifikasi ulang. Kadang juga meminta KPM untuk membawa dokumen pendukung seperti KK dan KTP untuk pembaruan data.

9. Apakah Anda merasa pelatihan yang diberikan cukup untuk menangani tugas pendampingan?

10. Jawaban: Sebagian cukup, tapi kami berharap ada pelatihan lanjutan, terutama dalam hal manajemen konflik dan penggunaan aplikasi data KPM yang terbaru.

11. Menurut Anda, seberapa penting peran edukasi dalam proses pendampingan penyaluran bantuan sosial?

Jawaban: Peran edukasi sangat penting agar pendamping memahami tidak hanya teknis pencairan, tapi juga filosofi dan tujuan dari program bantuan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Edukasi membentuk sikap profesional, empati, dan pemahaman kebijakan yang komprehensif.

12. Apakah pendamping PKH sudah memiliki pemahaman yang cukup terkait regulasi dan dinamika sosial penerima bantuan?

Jawaban: Sebagian sudah cukup, namun masih ada gap pengetahuan terutama saat ada regulasi baru atau perubahan prosedur. Dibutuhkan pelatihan berkelanjutan, bukan hanya sekali saat rekrutmen.

13. Apa bentuk edukasi yang seharusnya diberikan kepada pendamping agar mereka lebih efektif di lapangan?

Jawaban: Edukasi berbasis praktik, simulasi kasus, pelatihan komunikasi empatik, literasi digital, dan pelatihan pemecahan masalah. Pendamping juga perlu pemahaman sosiologi kemiskinan agar tidak sekadar administratif.

14. Apakah pendamping telah mampu menjadi agen edukatif bagi KPM?

Jawaban: Beberapa pendamping cukup berhasil, tapi banyak juga yang fokus pada fungsi administratif. Pendamping idealnya juga mengedukasi KPM soal keuangan, prioritas kebutuhan, dan kemandirian keluarga.

15. Apa harapan Anda sebagai edukator terhadap peningkatan kapasitas pendamping PKH ke depan?

Jawaban: Perlu adanya sistem pembelajaran berkelanjutan dan pembinaan dari dinas atau instansi, agar pendamping tidak hanya menjadi perantara pencairan, tapi juga motor perubahan sosial.

16. Seberapa besar peran motivasi dalam mendampingi KPM selama proses penyaluran bantuan sosial?

Jawaban: Motivasi sangat penting. Pendamping bukan hanya fasilitator teknis, tetapi juga agen perubahan sosial yang mampu menyemangati KPM agar tidak bergantung terus pada bantuan dan memiliki visi kemandirian.

17. Apa bentuk motivasi yang Anda berikan kepada KPM agar tidak hanya bergantung pada bantuan sosial?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawaban: Kami sering mengingatkan mereka bahwa bantuan ini hanya jembatan, bukan tujuan akhir. Kami mendorong mereka untuk melihat potensi keluarga, berwirausaha, menyekolahkan anak, dan tidak malu untuk mandiri.

18. Apa tantangan terbesar Anda sebagai pendamping dalam menjaga semangat KPM?

Jawaban: Tantangannya adalah sikap pasif sebagian KPM yang merasa nyaman dengan bantuan. Juga keterbatasan waktu dan jumlah pendamping membuat motivasi tidak bisa diberikan secara intensif ke semua KPM.

19. Apakah Anda juga termotivasi dalam menjalankan tugas sebagai pendamping meskipun beban kerja tinggi?

Jawaban: Tentu saja, meskipun lelah dan kadang mendapat tekanan, saya merasa bangga jika KPM saya bisa mandiri atau anak mereka berhasil sekolah. Itu motivasi terbesar kami sebagai pendamping.

20. Apa saran Anda agar motivasi kerja pendamping tetap terjaga dan tidak mudah putus asa?

Jawaban: Diperlukan apresiasi dari instansi, pelatihan yang membangun semangat, serta forum sharing antar pendamping agar bisa saling menguatkan. Kami juga butuh didengarkan oleh pimpinan.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Pertanyaan ke KPM PKH

Nama : Mursinah  
Usia : 45 tahun  
Jenis Kelamin : perempuan  
Pekerjaan : KPM PKH

### Posisi Dalam Penelitian: Informan Pendukung

1. Apakah Anda merasa terbantu dengan peran pendamping sebagai fasilitator selama proses penyaluran bantuan?

Jawaban: Iya, sangat terbantu. Pendamping selalu memberi tahu informasi terbaru dan menjelaskan jika ada perubahan. Kami jadi tidak bingung, terutama untuk pencairan di bank atau masalah teknis lainnya

2. Apakah Anda merasa dilibatkan dalam proses atau hanya sebagai penerima pasif?

Jawaban: Dulu saya hanya menerima, tapi sekarang saya merasa lebih terlibat. Pendamping sering tanya pendapat kami dan minta kami aktif di pertemuan. Itu membuat saya merasa dihargai.

3. Apa hambatan yang Anda alami dalam memahami alur bantuan dan bagaimana peran pendamping membantu Anda?

Jawaban: Kadang informasi dari pusat berbeda dengan di lapangan, jadi kami bingung. Tapi pendamping cepat klarifikasi dan bantu jelaskan. Kalau ada masalah di bank, mereka juga bantu urus.

4. Bagaimana pendamping memfasilitasi Anda dalam memecahkan masalah yang dihadapi terkait bantuan?

Jawaban: Kalau kami tidak bisa mencairkan bantuan atau datanya salah, pendamping bantu langsung ke kelurahan atau dinas sosial. Mereka juga mengarahkan langkah-langkah yang harus kami lakukan.

Nama : Sarmiati  
Usia : 39 tahun



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jenis Kelamin : perempuan

Pekerjaan : KPM PKH

Posisi Dalam Penelitian: Informan Pendukung

5. Apa harapan Anda terhadap peran fasilitator dalam program PKH ke depan?

Jawaban: Saya harap pendamping tetap aktif membantu, tapi juga bisa menghubungkan kami dengan pelatihan atau peluang usaha. Jadi tidak hanya bantuan uang, tapi juga solusi jangka panjang.

6. Bagaimana pengalaman Anda saat menerima bantuan sosial melalui PKH?

Jawaban: Alhamdulillah sangat membantu untuk kebutuhan anak sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Tapi kadang pencairannya terlambat.

7. Apakah pendamping PKH membantu Anda dalam proses pencairan bantuan?

Jawaban: Iya, biasanya kami diberi informasi lewat grup WhatsApp atau datang langsung ke rumah. Kalau ada masalah, beliau juga bantu urus ke bank.

8. Apa masalah yang pernah Anda alami dalam menerima bantuan?

Jawaban: Pernah waktu itu datanya tidak cocok dengan KTP saya, jadi bantuan tertahan. Tapi setelah dibantu pendamping, akhirnya bisa cair.

Nama : Silas

Usia : 30 tahun

Jenis Kelamin : perempuan

Pekerjaan : KPM PKH

Posisi Dalam Penelitian: Informan Pendukung

9. Apakah Anda merasa informasi yang diberikan oleh pendamping sudah jelas?



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawaban: Cukup jelas. Kadang kami juga bisa tanya langsung kalau bingung.

10. Apa saran Anda agar pendampingan dan bantuan bisa berjalan lebih baik?

Jawaban: Mungkin lebih sering ada pertemuan atau pengecekan data supaya tidak ada kesalahan lagi. Dan bantuan juga semoga lebih cepat cair.

11. Apakah KPM memahami tujuan dari bantuan sosial PKH yang diterima?

Jawaban: Sebagian besar hanya tahu bahwa bantuan itu untuk kebutuhan sekolah anak, tapi tidak semua paham bahwa tujuannya adalah untuk memutus rantai kemiskinan. Edukasi kepada KPM perlu diperkuat agar mereka tidak tergantung.

12. Menurut Anda, apakah KPM perlu mendapatkan pelatihan atau edukasi khusus terkait pengelolaan bantuan?

Jawaban: Sangat perlu. KPM sebaiknya dibekali edukasi pengelolaan keuangan rumah tangga, pemanfaatan bantuan secara produktif, serta motivasi untuk mandiri secara ekonomi.

Nama : Wasti  
Usia : 40 tahun  
Jenis Kelamin : perempuan  
Pekerjaan : KPM PKH

Posisi Dalam Penelitian: Informan Pendukung

13. Apakah selama ini KPM mendapatkan edukasi atau informasi yang memadai dari pendamping?

Jawaban: Belum semua. Informasi masih bersifat teknis seperti jadwal pencairan. Edukasi tematik tentang kesehatan, pendidikan anak, dan pengelolaan keuangan masih minim dan seharusnya jadi bagian rutin.

14. Bagaimana strategi edukatif yang ideal bagi KPM dalam konteks bantuan sosial?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawaban: Edukasi harus praktis, kontekstual, dan rutin. Misalnya lewat pertemuan kelompok, modul sederhana, dan pendekatan visual/audio karena latar belakang pendidikan KPM bervariasi.

15. Apa tantangan utama dalam mengedukasi KPM dan bagaimana solusinya?

Jawaban: Tantangannya adalah waktu, motivasi rendah, dan kesenjangan literasi. Solusinya adalah pendekatan informal, melibatkan tokoh lokal, dan membuat edukasi terasa relevan dan bermanfaat langsung.

16. Apa perasaan Anda ketika menerima bantuan dari program PKH?

Jawaban: Saya bersyukur sekali. Bantuan ini membuat saya bisa menyekolahkan anak dan memenuhi kebutuhan pokok. Tapi saya juga sadar bahwa saya tidak bisa selamanya bergantung pada bantuan.

Nama : Ria  
 Usia : 30 tahun  
 Jenis Kelamin : perempuan  
 Pekerjaan : KPM PKH

Posisi Dalam Penelitian: Informan Pendukung

17. Apakah Anda merasa termotivasi untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga setelah menerima bantuan?

Jawaban: Iya, saya ingin berusaha lebih. Saya sedang coba berjualan kecil-kecilan dan berharap suatu hari bisa mandiri. Pendamping juga sering menyemangati kami untuk mencoba usaha sendiri.

18. Menurut Anda, apakah pendamping cukup memberi motivasi dan semangat selama ini?

Jawaban: Iya, pendamping sering bilang bahwa bantuan ini hanya sementara. Mereka selalu dorong kami agar tidak malu bekerja atau belajar hal baru. Itu sangat membantu saya secara mental.

19. Apa harapan Anda terhadap program ini agar tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga harapan hidup yang lebih baik?





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jawaban: Saya berharap ada pelatihan keterampilan, modal usaha kecil, atau program lanjutan. Jadi kami tidak hanya menerima uang, tapi juga punya bekal untuk keluar dari kemiskinan.

20. Apa yang membuat Anda tetap semangat menjalani hidup meski kondisi ekonomi masih sulit?

Jawaban: Anak-anak. Saya ingin mereka punya masa depan lebih baik dari saya. Bantuan ini jadi penyemangat, tapi motivasi terbesar saya adalah keluarga dan harapan hidup yang lebih layak.

### Pertanyaan ke Kepala Desa

Nama : Udin Januarji

Usia : 45 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Kepala Desa

Posisi Dalam Penelitian: Informan Pendukung

1. Bagaimana Bapak/Ibu melihat peran pendamping PKH di desa ini dalam menyalurkan bantuan sosial?

Jawaban:

Pendamping PKH berperan penting dalam memastikan bantuan sampai ke keluarga penerima manfaat (KPM) secara tepat sasaran. Mereka membantu memverifikasi data, mendampingi KPM dalam proses pencairan, serta memberikan edukasi terkait kewajiban dan hak penerima. Namun, tantangannya adalah jumlah pendamping yang terbatas dibanding jumlah KPM, sehingga terkadang kurang optimal dalam pemantauan.

2. Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam pendampingan penyaluran PKH di desa ini?

Jawaban:

Kendala yang sering kami hadapi antara lain adalah:

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Data yang kurang akurat, seperti penerima yang sebenarnya sudah mampu tapi masih tercatat sebagai KPM.
- Komunikasi yang kurang lancar antara pendamping, pemerintah desa, dan dinas sosial.
- Pemahaman masyarakat yang minim tentang aturan dan tujuan PKH, sehingga muncul kesalahpahaman atau protes.
- Jumlah pendamping yang tidak sebanding dengan cakupan wilayah kerja mereka.

3. Apakah ada ketidaksesuaian antara data penerima dan kondisi riil di lapangan? Bagaimana cara mengatasinya?

Jawaban:

Sering kali kami menemukan ketidaksesuaian, seperti penerima yang sudah tidak miskin namun masih menerima bantuan. Kami mengatasinya dengan menyampaikan temuan tersebut ke pendamping dan dinas sosial melalui musyawarah desa. Kami juga aktif dalam verifikasi ulang data dan mendorong penggunaan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang lebih akurat.

4. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung tugas pendamping PKH?

Jawaban:

Kami berperan sebagai fasilitator, membantu pendamping dalam mengakses data, memfasilitasi kegiatan sosialisasi, serta menengahi jika ada konflik di masyarakat terkait penerimaan bantuan. Kami juga mendorong transparansi dan musyawarah agar program tepat sasaran.

5. Apakah pernah terjadi konflik atau kecemburuan sosial antarwarga terkait penyaluran PKH?

Jawaban:

Ya, pernah terjadi, terutama ketika masyarakat merasa ada ketimpangan atau tidak adil dalam penentuan penerima. Oleh karena itu, kami selalu mengedepankan sosialisasi, membuka forum musyawarah, dan melibatkan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tokoh masyarakat agar ada pemahaman bersama mengenai kriteria penerima.

6. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap peningkatan kualitas pendampingan PKH ke depan?

Jawaban:

Kami berharap ada:

- Penambahan jumlah pendamping, agar pendampingan lebih intensif.
- Pelatihan berkelanjutan bagi pendamping dan pemerintah desa tentang regulasi terbaru.
- Pembaruan data secara rutin dan akurat.
- Sistem pengaduan yang responsif agar masyarakat bisa menyampaikan keluhan secara tertib.



#### Lampiran 4 Reduksi Data

No	Informan	Indikator	Hasil Wawancara/ Observasi	Kesimpulan
1	Syafrizal 9 Mei 2025	Fasilitator Membuka Ruang Dialog	Fasilitasi yang diberikan berupa semangat kepada kpm	Memberikan arahan kepada KPM terkait proses penyaluran bantuan sosial,
2	Udin Januarji 10 Mei 2025	Fasilitator Membuka Ruang Dialog	Memberikan arahan kepada Kpm bertujuan untuk menyampaikan tujuan PKH dan merubah pola pikir KPM Pendamping aktif dalam memfasilitasi musyawarah dengan warga	menyampaikan tujuan dasar PKH dan merubah pola pikir KPM dengan cara mengikutsertakan kpm dalam rapat dan pertemuan kelompok
3	Mursidah 14 Mei 2025	Fasilitator Membuka Ruang Dialog	Kpm sering di ajak rapat dan pertemuan kelompok	
4	Syafrizal 9 Mei 2025	Fasilitator Menggali Potensi Dan Kebutuhan Masyarakat	Menanyakan kendala dan kesulitan yang di hadapi KPM	Pendamping mencatat kebutuhan dan kendala dalam penyaluran bantuan
5	Silas 15 Mei 2025	Fasilitator Menggali Potensi Dan Kebutuhan Masyarakat	Ditanya ketersediaan mengikuti pelatihan	dan berusaha menyelesaikan secara administratif, selain itu pendamping juga menyarankan KPM untuk mengikuti pelatihan
6	Syafrizal 9 mei 2025	Fasilitator Pengembangan Kapasitas Masyarakat	Pengembangan kapasitas belum maksimal, fokus kepada penyaluran bantuan	Pengembangan kapasitas belum maksimal, masih berfokus pada menyaluran bantuan sosial,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Diarung mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Udin Januarji 10 Mei 2025	Fasilitator Pengembangan Kapasitas Masyarakat	Kalau bisa ada prlatihan kewirausahaan untuk mendukung pengembangan kapasitas kpm	selain itu pihak desa menyarankan adanya pelatihan kewirausahaan untuk kpm
Ria 16 Mei 2025	Fasilitator Pengembangan Kapasitas Masyarakat	Kami belum mendapatkan pelatihan pengembangan kapasitas	
Syafrizal 9 Mei 2025	Fasilitator Menghubungkan masyarakat dengan sumberdaya	Melakukan pendamping pkh mulai dari sosialisasi, pencairan dan evaluasi program	Pendamping menjadi jembatan penghubung bagi KPM baik dalam proses pencairan ataupun apabila ada kendala dan masalah yang ditemukan, pendamping memastikan informasi yang jelas dapat di terima KPM.
8 Syafrizal 9 mei 2025	Fasilitator Menghubungkan masyarakat dengan sumberdaya	Saya memastikan informasi diterima dengan jelas menjembatani kpm dan pihak instansi	
9 Wasti 15 Mei 2025	Fasilitator Menghubungkan masyarakat dengan sumberdaya	Pernah ditemukan ketidak cocokan data , pendamping membantu menjembatani penyelesaian masalah	
10 Syafrizal 9 mei 2025	Mediator Menjembatani Komunikasi	Saya menjadi penghubung informasi antara bank, dinas sosial, dan kpm	Pendamping sebagai penghubung dalam proses komunikasi. Suatu program pemerintah dapat dilihat baik dari proses komunikasi yang terbentuk, pendamping memastikan kpm mendapatkan informasi yang jelas
11 Silas 12 Mei 2025	Mediator Menjembatani Komunikasi	Dengan adanya penjelasan dari pendamping kpm lebih mudah memahami informasi	
12 Udin Januarji 10 Mei 2025	Mediator Menjembatani Komunikasi	Efektifitas program pemerintah bisa	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			dilihat dari komunikasi yang terbentuk	
15	Syafrizal 9 Mei 2025	Mediator Penyelesaian konflik sosial	Kendala utama adalah ketidak sesuaian data	Kendala utama yang selalu ditemui adalah ketidak sesuaian data, hal itu memicu konflik sosial antar masyarakat, namun begitu oendamping mencari solusi dengan verifikasi dan musyawarah
14	Udin Januarji 10 Mei 2025	Mediator Penyelesaian konflik sosial	Pernah terjadi konflik sosial yaitu masyarakat merasa tidak adil karena tidak mendapatkan bantuan PKH	
15	Mursidah 15 Mei 2025	Mediator Penyelesaian konflik sosial	Pendamping mencari solusi dari masalah yang dihadapi kpm	
16	Syafrizal 9 Mei 2025	Mediator Menyusun keepakatan	Kami mengajak warga dala menyusun kesepakatan bersama	Tidak ditemukan dokumen perjanjian tertulis
17	Mursidah 14 Mei 2025	Mediator Meningkatkan keperccayaan dan kerjasama	Kami percaya pendamping kami selalu membantu	Tidak ada kendala berarti dalam proses kerjasama
18	Udin Januarji 10 Mei 2025	Mediator Meningkatkan keperccayaan dan kerjasama	Kerjasama cukup baik	
19	Syafrizal 9 Mei 2025	Edukator Memberikan informasi	Kami memberikan informasi secara terstruktur sesuai aturan dan arahan dari pemerintah	Pendamping memberikan informasi yang jelas kepada kpm terutama melalui pertemuan kelompok, namun begitu kpm menjelaskan bahwa informasi teknis sudah jelas namun untuk praktek masih minim
20	Udin Januarji 10 Mei 2025	Edukator Memberikan informasi	Kami memberikan informasi dari berbagai cara, baik pertemuan wa grup dll	
21	Ria 12 Mei 2025	Edukator Memberikan informasi	Informasi teknis jelas namun yang lain masih minim	
22	Syafrizal	Edukator	Kami belum	Meningkatkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

23	9 Mei 2025	Meningkatkan kesadaran kritis	banyak mengajak diskusi terkait makna bantuan sesungguhnya	kesadaran kritis dari pertemuan kelompok
24	Warsih 16 Mei 2025	Edukator Meningkatkan kesadaran kritis	Dulu saya hanya penerima namun sekarang saya merasa terlibat dengan aktif di pertemuan kelompok	
25	Syafrizal 9 Mei 2025	Edukator Pengembangan Keterampilan	Belum ada pelatihan pengelolaan usaha	Tidak ada pelatihan keterampilan selama penelitian. Pelatihan hanya bersifat teknis minim praktek
26	Marsinah 12 Mei 2025	Edukator Pengembangan Keterampilan	KPM Mendapatkan edukasi namun dalam hal yang masih terbatas, contoh dalam upaya peningkatan skill masih berupa teori dan minim praktek	
27	Syafrizal 9 mei 2025	Edukator Mendorong Perubahan Sikap	kami selalu bilang bantuan bukan tujuan akhir	Pendamping selalu menjelaskan tujuan PKH diakhir pertemuan, hal ini mendorong perubahan sikap kpm dan perubahan pola pikir dengan mencoba berwirausaha melalui usaha rumahan
28	Marsinah 12 Mei 2025	Edukator Mendorong Perubahan Sikap	Kami jadi semangat sedikit-sedikit usaha.”	
29	Syafrizal 9 mei 2025	Edukator Memfasilitasi Pembelajaran Partisipatif	Perlu adanya sistem pembelajaran berkelanjutan dan pembinaan dari dinas atau instansi, agar pendamping tidak	Perlu adanya sistem pembelajaran yang kompetitif namun masih belum ada perubahan konkrit



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau			hanya menjadi perantara pencairan, tapi juga moto perubahan sosial.	
	29	Udin Januarji 10 Mei 2025	Edukator Memfasilitasi Pembelajaran Partisipatif	Beberapa pendamping cukup berhasil, tapi banyak juga yang fokus pada fungsi administratif. Pendamping idealnya juga mengedukasi KPM
	30	Syafrizal 9 mei 2025	Motivator Membangkitkan semangat kolektif	Kami selalu mengajak mereka optimis.”
	31	Silas 17 Mei 2025	Motivator Membangkitkan semangat kolektif	ya, saya ingin berusaha lebih. Saya sedang coba berjualan kecil-kecilan dan berharap suatu hari bisa mandiri. Pendamping juga sering menyemangati kami untuk mencoba usaha sendiri”
	32	Syafrizal 9 mei 2025	Motivator Mendorong Partisipatif Aktif	“Kami ajak KPM aktif di pertemua
	33	Sarmiati 15 Mei 2025	Motivator Mendorong Partisipatif Aktif	saya mengikuti kegiatan-kegiatan kelompok, aktif dalam kegiatan pkk dan mendapatkan ilmu dari hal tersebut
	34	Wasti 14 Mei 2025	Motivator Mendorong Partisipatif Aktif	dengan adanya pelatihan pkh dan motivasi
				PM tampak antusias saat pendamping memberikan arahan motivasi
				Dengan adanya pkh kpm bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompok motivasi pendamping membuat kpm lebih bersemangat untuk mengatur gizi keluarga dan juga keuangan keluarga agar optimal bisa digunakan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau			pendamping saya lebih bersemangat untuk mengatur gizi keluarga dan juga keuangan keluarga agar optimal bisa digunakan		
	36	Wasti 14 Mei 2025	Motivator Membantu Kepercayaan Diri	“Kami jadi percaya diri untuk usaha kecil.”	PKH meningkatkan kepercayaan diri kpm dilihat dari keberanian KPM membuka usaha sendiri dan perubahan pola pikir untuk hidup mandiri.
	36	Ria 17 Mei 2025	Motivator Membantu Kepercayaan Diri	Motivasi untuk hidup mandiri dan suatu saat bisa graduasi mandiri setelah usaha yang dijalani mencukupi untuk kebutuhan keluarga	
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	37	Syafrizal 9 mei 2025	Motivator Membantu Menetapkan Tujuan	Kami sering mengingatkan mereka bahwa bantuan ini hanya jembatan, bukan tujuan akhir. Kami mendorong mereka untuk melihat potensi keluarga, berwirausaha, menyekolahkan anak, dan tidak malu untuk mandiri.”.”	Pendamping mengingatkan tujuan dasar bantuan sosial PKH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004  
Telepon (0761) 562051 ; Faksimili (0761) 562052  
Web : <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

Pekanbaru, 04 Januari 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : B-09/Un.04/F.IV/PP.00.9/01/2023  
: Biasa  
: 1 (satu) Exp  
: Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
Di  
Pekanbaru**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: SILVIA FEBRI AGATA
N I M	: 11840122675
Semester	: IX (Sembilan)
Jurusan	: Pengembangan Masyarakat Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

**"ProbelematikaPenyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di  
Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar".**

Adapun sumber data penelitian adalah :

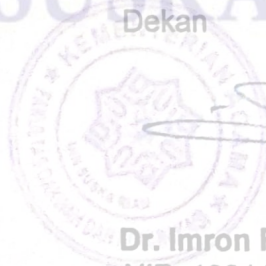
**"Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri  
Tengah Kabupaten Kampar".**

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

UIN SUSKA RIAU

Wassalam  
Dekan



**Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A**  
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan





PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 071/BKBP/2023/492

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca surat Kepala Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Nomor : 503/DPMPST/NON IZIN-5260/ tanggal 10 Januari 2023, dengan ini memberi Rekomendasi/Izin Penelitian kepada :

Nama : **SILVIA FEBRI AGATA**  
NISN : 11840122675  
Universitas : UIN SUSKA RIAU  
Program Studi : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
Jenjang : S1  
Alamat : PEKANBARU  
Judul Penelitian : **PROBLEMATIKA PENYALURAN BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA BINA BARU KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR**  
Lokasi : **KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA BINA BARU KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Dengan rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset dan Penelitian. Demikian terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 15 Agustus 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
Kepala Bidang ideologi, wawasan kebangsaan  
dan karakter Bangsa

**ONNITA, SE**  
Pembina ( IV/a )  
NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang bersangkutan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.